

Tanda Bukti Kirim

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Pelapor

PT Bank Perekonomian Rakyat Sinar Mas Pelita

Pelaporan

Profil Risiko Bank Perkreditan Rakyat Konvensional

Nomor Referensi

797931-1-PRBPRKS-R-S-20241231-010201-600189-31012025202106

Periode Data

S2 2024

User ID Petugas Pelaporan

bprsm1@gmail.com

Jumlah Form Laporan Diterima OJK

21 / 21

Tanggal Terakhir Upload Laporan

2025-01-31 20:21:06



Tanda Bukti Kirim merupakan tanda bukti yang sah dalam proses pengiriman laporan. Pastikan bahwa angka yang tertera pada Jumlah Form Laporan Diterima OJK telah lengkap dan sesuai dengan ketentuan pelaporan terkait.



PT BPR SINAR MAS PELITA

LAPORAN

HASIL PENILAIAN PELAKSANAAN

TATA KELOLA TAHUN 2024



PT BPR SINAR MAS PELITA

TAHUN 2024



Kantor Pusat Padalarang

Jalan Raya Padalarang No. 36 Kertamulya, Kab. Bandung Barat 40553, Telp. : 022-6809417

PT. BPR SINAR MAS PELITA

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia
No. KEP-395/KM - 13 / 1990 Tgl. 24 Agustus 1990

"MARI MAJU BERSAMA KAMI"

LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENANDATANGANAN LAPORAN TATA KELOLA

Dengan ini kami menyatakan bahwa:

Laporan Hasil Penilaian Pelaksanaan Tata Kelola PT BPR Sinar Mas Pelita Tahun 2024

Telah disusun sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai berikut:

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 9 Tahun 2024 tanggal 1 Juli 2024 Tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah.
2. Surat Edaran OJK (SEOJK) Nomor 12/ SEOJK.03/2024 tanggal 18 Oktober 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perekonomian Rakyat.

Demikian Laporan ini dibuat yang menjadi gambaran umum penerapan Tata Kelola PT BPR Sinar Mas Pelita selama tahun 2024. Penerapan Tata Kelola BPR yang baik diharapkan dapat mendorong kinerja perusahaan, melindungi kepentingan pemangku kepentingan (stakeholders) dan meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan serta nilai-nilai etika yang berlaku umum di industri Bank Perekonomian Rakyat (BPR).

BANDUNG BARAT, 30 Januari 2025

PT. BPR Sinar Mas Pelita

Menyetujui,

Julia Intan Sitorus
Komisaris Utama



PT. BPR SINAR MAS PELITA

Taufiq Nugraha
Direktur Utama

KERTAS KERJA LAPORAN HASIL PENILAIAN PELAKSANAAN TATA KELOLA TAHUN 2024

Faktor 1. Aspek Pemegang Saham

No	Kriteria / Indikator	Penilaian	Isian Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur			
1	Komposisi dan persyaratan pemegang saham memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.	Telah Terpenuhi	<i>BPR telah memenuhi ketentuan yang diatur dalam perundang-undangan terkait komposisi dan persyaratan pemegang saham. BPR didirikan oleh lebih dari dua pemegang saham, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Identitas pemegang saham telah dicantumkan dengan jelas, mencakup nama, alamat, dan nomor identitas. Selain itu, persentase kepemilikan saham masing-masing pemegang saham juga telah dijelaskan secara rinci dalam dokumen pendirian berupa akta notaris.</i>
2	Kebijakan dan tata cara pengambilan keputusan melalui RUPS tercantum dalam anggaran dasar dan selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Telah Terpenuhi	<i>Implementasi indikator kebijakan dan tata cara pengambilan keputusan melalui RUPS telah tercantum dalam anggaran dasar BPR dan selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang menunjukkan bahwa kondisi tersebut telah terpenuhi.</i>
B. Proses Penerapan Tata Kelola			
3	Pelaksanaan komunikasi visi dan misi pengembangan BPR kepada Direksi dan/ atau Dewan Komisaris.	Baik	<i>Pelaksanaan komunikasi visi dan misi pengembangan BPR kepada Direksi dan/ atau Dewan Komisaris telah dilakukan dengan baik, di mana informasi disampaikan secara jelas dan terstruktur, sehingga semua pihak memahami arah dan tujuan pengembangan BPR secara menyeluruh.</i>
4	Pemantauan terhadap perkembangan BPR melalui hasil pengawasan Dewan Komisaris.	Cukup Baik	<i>Pemantauan terhadap perkembangan BPR melalui hasil pengawasan Dewan Komisaris telah dilakukan dengan cukup baik oleh pemegang saham, yang secara aktif mengevaluasi laporan dan</i>

			<i>rekomendasi dari Dewan Komisaris untuk memastikan bahwa kinerja BPR sesuai dengan harapan dan tujuan yang telah ditetapkan.</i>
5	Dukungan pemegang saham dalam pengembangan BPR melalui perencanaan permodalan atau dukungan pengembangan lain.	Cukup Baik	<i>Dukungan pemegang saham dalam pengembangan BPR melalui perencanaan permodalan dan dukungan pengembangan lainnya telah berjalan dengan cukup baik, di mana pemegang saham secara aktif berkontribusi dalam penyediaan modal dan sumber daya yang diperlukan untuk mendukung pertumbuhan dan pengembangan BPR, serta memastikan keberlanjutan operasional yang optimal.</i>
6	Memastikan pelaksanaan tata kelola yang sehat, antara lain menghindari benturan kepentingan, intervensi, mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan/ atau Dewan Komisaris.	Cukup Baik	<i>Pelaksanaan tata kelola yang sehat telah diterapkan dengan cukup baik, di mana upaya untuk menghindari benturan kepentingan, intervensi, serta pengambilan keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, termasuk dalam keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris, telah dilakukan secara konsisten.</i>
7	Pengambilan keputusan melalui RUPS memperhatikan, antara lain masukan dan rekomendasi dari Dewan Komisaris, serta masukan atau pendapat dari seluruh pemegang saham.	Cukup Baik	<i>Pengambilan keputusan melalui RUPS telah dilakukan dengan cukup baik, di mana proses tersebut memperhatikan masukan dan rekomendasi dari Dewan Komisaris serta pendapat dari seluruh pemegang saham, sehingga menciptakan keputusan yang lebih inklusif dan transparan.</i>
C. Hasil Penerapan Tata Kelola			
8	Pemegang saham memperoleh hak dan perlakuan yang adil, antara lain dalam pelaksanaan aksi korporasi.	Baik	<i>Pemegang saham telah memperoleh hak dan perlakuan yang adil dalam pelaksanaan aksi korporasi, yang tercermin dari transparansi dan kesetaraan dalam setiap proses pengambilan keputusan serta akses informasi yang memadai.</i>
9	Perkembangan kinerja BPR sejalan dengan rencana strategis, antara lain melalui realisasi rencana permodalan atau rencana dukungan lainnya.	Cukup Baik	<i>Perkembangan kinerja BPR menunjukkan keselarasan dengan rencana strategis, yang terlihat dari realisasi rencana permodalan dan dukungan lainnya yang telah dilaksanakan secara efektif, pada BPR berada dalam kondisi cukup</i>

			<i>baik.</i>
10	Pemegang saham tidak melakukan benturan kepentingan, intervensi, mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan/ atau Dewan Komisaris.	Cukup Baik	<i>Pemegang saham telah menunjukkan penerapan yang cukup baik dalam menghindari benturan kepentingan, intervensi, serta pengambilan keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, termasuk dalam keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris.</i>
11	Penggunaan laba dan pembagian dividen memperhatikan kebijakan penggunaan laba dan pembagian dividen yang sejalan dengan anggaran dasar dan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta mempertimbangkan kondisi eksternal dan internal.	Cukup Baik	<i>Penggunaan laba dan pembagian dividen telah dilakukan dengan cukup baik, di mana kebijakan yang diterapkan sejalan dengan anggaran dasar dan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta mempertimbangkan kondisi eksternal dan internal yang relevan.</i>

Ringkasan Penilaian Struktur dan Infrastruktur

Indikator dengan nilai Tidak Dinilai:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Telah Terpenuhi:	2 Indikator
Indikator dengan nilai Sebagian Terpenuhi:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Belum Terpenuhi:	0 Indikator
Kesimpulan Penilaian Struktur dan Infrastruktur:	Terpenuhi Secara Keseluruhan

Ringkasan Penilaian Proses dan Hasil

Indikator dengan nilai Tidak Dinilai:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Sangat Baik:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Baik:	2 Indikator
Indikator dengan nilai Cukup Baik:	7 Indikator
Indikator dengan nilai Kurang Baik:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Tidak Baik:	0 Indikator
Modus Nilai Indikator Proses dan Hasil:	Cukup Baik
Median Nilai Indikator Proses dan Hasil:	Cukup Baik
Rata-rata Nilai Indikator Proses dan Hasil:	
Nilai Faktor yang Dipilih:	Nilai 3 Cukup Memadai

Kesimpulan Penilaian Faktor 1. Aspek Pemegang Saham

Nilai Faktor

Nilai 3 Cukup Memadai	
Penjelasan Nilai Faktor	
<p>Memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/ atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan cukup memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang cukup baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> Struktur pemegang saham memenuhi seluruh ketentuan dan pelaksanaan tata kelola cukup memadai sehingga benturan kepentingan dapat diselesaikan, intervensi yang timbul tidak signifikan, tidak mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan/atau keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebagian pengambilan kebijakan aksi korporasi melalui RUPS sejalan dengan anggaran dasar, ketentuan peraturan perundang-undangan, dan rencana strategis sehingga perencanaan pengembangan BPR belum sepenuhnya terealisasikan yang tercermin pada pemenuhan ketentuan permodalan, kinerja keuangan, dan/atau perkembangan kegiatan usaha BPR. Kebijakan penggunaan laba dan pembagian dividen telah dievaluasi sehingga sebagian pelaksanaan penggunaan laba dan pembagian dividen telah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan 	
No	Analisa Faktor Positif dan Negatif
A. Struktur dan Infrastruktur	
1)	Faktor Positif
	<ol style="list-style-type: none"> Manajemen BPR telah menilai bahwa indikator Komposisi dan persyaratan pemegang saham memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, berjalan dengan telah terpenuhi. Implementasi indikator Kebijakan dan tata cara pengambilan keputusan melalui RUPS tercantum dalam anggaran dasar dan selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, di BPR menunjukkan kondisi telah terpenuhi.
2)	Faktor Negatif
	PT BPR SINAR MAS PELITA mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.
B. Proses Penerapan Tata Kelola	
1)	Faktor Positif
	1. Indikator Pelaksanaan komunikasi visi dan misi pengembangan BPR kepada Direksi dan/ atau Dewan Komisaris, pada BPR indikator Pelaksanaan komunikasi visi dan misi pengembangan BPR kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris, dinilai baik.
2)	Faktor Negatif
	<ol style="list-style-type: none"> Implementasi indikator Pemantauan terhadap perkembangan BPR melalui hasil pengawasan Dewan Komisaris, di BPR menunjukkan kondisi cukup baik. BPR telah mengimplementasikan indikator Memastikan pelaksanaan tata kelola yang sehat, antara lain menghindari benturan kepentingan, intervensi, mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris, dengan penilaian cukup baik. Implementasi indikator Dukungan pemegang saham dalam pengembangan BPR melalui perencanaan permodalan atau dukungan pengembangan lain, di BPR menunjukkan kondisi cukup baik.
C. Hasil Penerapan Tata Kelola	
1)	Faktor Positif

	<ol style="list-style-type: none">1. Berdasarkan hasil penilaian, indikator Pemegang saham memperoleh hak dan perlakuan yang adil, antara lain dalam pelaksanaan aksi korporasi, pada BPR dinilai baik.2. Hasil evaluasi menunjukkan indikator Perkembangan kinerja BPR sejalan dengan rencana strategis, antara lain melalui realisasi rencana permodalan atau rencana dukungan lainnya, pada BPR berada dalam kondisi cukup baik.3. BPR telah mengimplementasikan indikator Pemegang saham tidak melakukan benturan kepentingan, intervensi, mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan/ atau Dewan Komisaris, dengan penilaian cukup baik.4. Implementasi indikator Penggunaan laba dan pembagian dividen memperhatikan kebijakan penggunaan laba dan pembagian dividen yang sejalan dengan anggaran dasar dan ketentuan peraturan perundang- undangan, serta mempertimbangkan kondisi eksternal dan internal, di BPR menunjukkan kondisi cukup baik.
2)	Faktor Negatif
	PT BPR SINAR MAS PELITA mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.

Faktor 2. Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Direksi

No	Kriteria / Indikator	Penilaian	Isian Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur			
1	Jumlah anggota Direksi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.	Telah Terpenuhi	<i>Jumlah anggota Direksi telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, dan salah satu anggota Direksi telah ditunjuk sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan, sehingga indikator penerapannya di BPR telah terpenuhi dengan baik.</i>
2	Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di wilayah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Telah Terpenuhi	<i>Seluruh anggota Direksi telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dengan bertempat tinggal di provinsi yang sama yaitu Jawa Barat sehingga indikator penerapan di BPR telah terpenuhi sepenuhnya.</i>
3	Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada bank, lembaga jasa keuangan, perusahaan, dan/ atau lembaga lain sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Telah Terpenuhi	<i>Anggota Direksi telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dengan tidak merangkap jabatan pada bank, lembaga jasa keuangan, perusahaan, dan/atau lembaga lain, sehingga indikator penerapan di BPR telah terpenuhi.</i>
4	Seluruh anggota Direksi memenuhi persyaratan terkait dengan hubungan keluarga, hubungan keuangan, dan kepemilikan saham sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Sebagian Terpenuhi	<i>Sebagian anggota Direksi sebagian memenuhi persyaratan terkait hubungan keluarga, hubungan keuangan, dan kepemilikan saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, namun terdapat satu pengecualian di mana Direktur Operasional memiliki hubungan keluarga dengan Komisaris Utama, yang menunjukkan bahwa indikator penerapannya belum sepenuhnya terpenuhi.</i>
5	Direksi memastikan pemenuhan sumber daya manusia dan struktur organisasi, termasuk telah membentuk satuan kerja atau menunjuk Pejabat Eksekutif dengan kuantitas dan kualitas yang memadai dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Direksi.	Sebagian Terpenuhi	<i>Direksi telah memastikan pemenuhan sumber daya manusia dan struktur organisasi termasuk telah membentuk satuan kerja atau menunjuk Pejabat Eksekutif dengan kuantitas dan kualitas yang memadai dengan cukup baik, namun indikator penerapannya hanya sebagian terpenuhi karena terdapat kekosongan pada posisi pejabat eksekutif kepatuhan.</i>



6	Direksi telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang memuat paling sedikit: a. tugas, tanggung jawab, dan wewenang Direksi; b. pengorganisasian BPR dan pembidangan tugas Direksi; dan c. prosedur pengambilan keputusan Direksi.	Sebagian Terpenuhi	<i>Direksi telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang mencakup tugas, tanggung jawab, dan wewenang Direksi, pengorganisasian BPR, serta prosedur pengambilan keputusan. Namun, indikator penerapannya hanya sebagian terpenuhi karena pedoman tersebut belum disesuaikan dengan kondisi terkini.</i>
7	Direksi menyusun dan menetapkan kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai BPR.	Sebagian Terpenuhi	<i>Direksi telah menyusun dan menetapkan kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai BPR, namun indikator penerapannya hanya sebagian terpenuhi karena masih terdapat beberapa aspek yang perlu diperbaiki atau disempurnakan untuk memastikan kebijakan tersebut lebih efektif.</i>
8	Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/ atau jasa profesional sebagai tenaga ahli atau konsultan kecuali memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Telah Terpenuhi	<i>Direksi telah memenuhi indikator penerapan dengan tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau jasa profesional sebagai tenaga ahli atau konsultan, kecuali yang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.</i>
9	Direksi memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab pengelolaan BPR sesuai dengan ketentuan.	Telah Terpenuhi	<i>Direksi telah memenuhi indikator penerapan dengan memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta menunjukkan kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan guna meningkatkan kemampuan, pengalaman, dan keahlian dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab pengelolaan BPR sesuai dengan ketentuan yang berlaku. di buktikan dengan adanya notulen RUPS LB tanggal 26 Januari 2024 dan Akta No 11 tanggal 17 April 2024 oleh Notaris Memet Aditya Rahmat , S.H M.KN</i>
B. Proses Penerapan Tata Kelola			

10	Direksi melaksanakan tugas dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, kehati-hatian, tanggung jawab secara independen, dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang Direksi.	Baik	<i>Direksi telah melaksanakan tugas dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian, serta secara independen tanpa memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang, sehingga indikator penerapannya dinyatakan baik.</i>
11	Direksi melaksanakan penerapan prinsip tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi.	Cukup Baik	<i>Hasil evaluasi menunjukkan indikator Direksi melaksanakan penerapan prinsip tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi, pada BPR berada dalam kondisi cukup baik.</i>
12	Direksi menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan (termasuk temuan yang bersifat pelanggaran terhadap undang-undang dan temuan berulang) dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan dan/ atau otoritas lain.	Baik	<i>Direksi telah menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan serta rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab, yang dapat dilihat dari laporan post audit monitoring SKAI dan laporan pemenuhan hasil pemeriksaan OJK, sehingga indikator penerapannya dinyatakan baik.</i>
13	Direksi menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada pihak yang berhak memperoleh data dan informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk kepada Dewan Komisaris.	Cukup Baik	<i>Direksi telah menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada pihak yang berhak, termasuk kepada Dewan Komisaris; namun, indikator penerapannya dinyatakan cukup baik karena dokumentasi yang ada belum sepenuhnya lengkap.</i>
14	Pengambilan keputusan Direksi yang diambil sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.	Baik	<i>Pengambilan keputusan Direksi telah dilakukan sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja, yang terlihat dari proses pengambilan keputusan yang dilakukan melalui musyawarah mufakat, serta suara terbanyak jika musyawarah mufakat tidak tercapai. Selain itu, Direksi juga mencantumkan Dissenting Opinion apabila terdapat perbedaan pendapat, sehingga indikator penerapannya dinyatakan baik.</i>

15	Kebijakan dan keputusan strategis yang diputuskan dalam rapat Direksi memperhatikan pengawasan Dewan Komisaris dan terlebih dahulu dilakukan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.	Baik	<i>Kebijakan dan keputusan strategis yang diambil dalam rapat Direksi telah memperhatikan pengawasan Dewan Komisaris dan dilakukan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat. Indikator penerapannya dinyatakan baik</i>
16	Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/ atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/ atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	Baik	<i>Direksi telah memenuhi indikator penerapan dengan tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR. Hal ini tercermin dari komitmen Direksi untuk tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, kecuali remunerasi dan fasilitas lainnya yang telah ditetapkan oleh RUPS.</i>
17	Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan dan bidang lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.	Baik	<i>Implementasi indikator Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan dan bidang lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, di BPR menunjukkan kondisi baik.</i>
18	Direksi telah mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR yang dapat memengaruhi hak dan kewajiban pegawai dalam rangka pencapaian visi dan misi BPR dengan menggunakan media (elektronik dan nonelektronik) yang mudah diakses oleh seluruh pegawai.	Cukup Baik	<i>Direksi telah mengkomunikasikan kebijakan strategis BPR kepada seluruh pegawai, yang dapat memengaruhi hak dan kewajiban mereka, meskipun indikator penerapannya masih dianggap cukup baik karena belum semua pegawai dapat mengakses informasi tersebut secara optimal melalui media yang disediakan, baik elektronik maupun nonelektronik.</i>
19	Direksi mengungkapkan: a. kepemilikan saham pada BPR yang bersangkutan dan perusahaan lain; dan b. hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lain dan/ atau pemegang saham BPR.	Baik	<i>Direksi telah secara transparan mengungkapkan kepemilikan saham pada BPR dan perusahaan lain, serta hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lain, dan/atau pemegang saham BPR, yang menunjukkan komitmen direksi terhadap prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola perusahaan.</i>

20	Anggota Direksi mampu menjaga integritas dan reputasi keuangan serta mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab.	Baik	<i>Anggota Direksi telah berhasil menjaga integritas dan reputasi keuangan, serta secara efektif mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, yang tercermin dalam kinerja yang konsisten dan profesional dalam setiap aspek operasional BPR.</i>
21	Direksi melaksanakan dan mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi secara konsisten.	Cukup Baik	<i>Direksi telah melaksanakan dan mengevaluasi pedoman serta tata tertib kerja anggota Direksi secara konsisten, meskipun masih terdapat beberapa area yang perlu ditingkatkan untuk mencapai kepatuhan yang lebih optimal, pada BPR saat ini dinilai cukup baik.</i>
22	Direksi mengevaluasi kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai BPR.	Cukup Baik	<i>Direksi telah melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai BPR, namun masih terdapat beberapa aspek yang perlu diperbaiki untuk memastikan kesesuaian dalam sistem remunerasi tersebut.</i>
C. Hasil Penerapan Tata Kelola			
23	Direksi melaksanakan tugas dengan baik dan telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS.	Baik	<i>Direksi telah melaksanakan tugas dengan baik dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS, yang dibuktikan dengan adanya notulen RUPS yang mencatat semua laporan dan keputusan yang diambil.</i>
24	Seluruh pegawai mengetahui dan terlibat dalam implementasi atas kebijakan strategis untuk mencapai visi dan misi BPR.	Cukup Baik	<i>Seluruh pegawai telah mengetahui dan terlibat dalam implementasi kebijakan strategis untuk mencapai visi dan misi BPR, meskipun masih perlu ditingkatkan untuk memastikan pemahaman dan keterlibatan yang lebih menyeluruh.</i>
25	Keputusan Direksi mengikat dan menjadi tanggung jawab seluruh anggota Direksi.	Baik	<i>Keputusan Direksi telah diambil dengan kesepakatan dan menjadi tanggung jawab seluruh anggota Direksi, yang menunjukkan komitmen bersama dalam menjalankan keputusan tersebut secara efektif dan bertanggung jawab, pada BPR saat ini dinilai baik.</i>

26	Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh Direksi dan ditindaklanjuti sesuai komitmen yang disepakati.	Cukup Baik	<i>Hasil rapat Direksi telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh anggota Direksi dan ditindaklanjuti sesuai komitmen yang disepakati; meskipun demikian, pengungkapan dissenting opinions yang terjadi dalam rapat belum sepenuhnya dituangkan dalam notulen, kondisi ini menunjukkan cukup baik.</i>
27	Terdapat peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian anggota Direksi dalam pengelolaan BPR dan peningkatan pengetahuan seluruh tingkatan atau jenjang organisasi yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja individu, peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders.	Cukup Baik	<i>Terdapat peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian anggota Direksi dalam pengelolaan BPR, serta peningkatan pengetahuan di seluruh tingkatan organisasi, yang ditunjukkan melalui peningkatan kinerja individu, kinerja BPR, penyelesaian permasalahan, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders, namun penerapan hasil pelatihan yang telah diikuti masih belum optimal diterapkan di BPR, menunjukkan adanya ruang untuk perbaikan dalam implementasi.</i>
28	Direksi menyampaikan laporan- laporan terkait penerapan tata kelola kepada pihak-pihak sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.	Sangat Baik	<i>Direksi telah menyampaikan laporan-laporan terkait penerapan tata kelola kepada pihak-pihak yang diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, terkini, utuh, dan tepat waktu, menunjukkan komitmen yang sangat baik dalam transparansi dan akuntabilitas.</i>

Ringkasan Penilaian Struktur dan Infrastruktur

Indikator dengan nilai Tidak Dinilai:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Telah Terpenuhi:	5 Indikator
Indikator dengan nilai Sebagian Terpenuhi:	4 Indikator
Indikator dengan nilai Belum Terpenuhi:	0 Indikator
Kesimpulan Penilaian Struktur dan Infrastruktur:	Telah Terpenuhi

Ringkasan Penilaian Proses dan Hasil

Indikator dengan nilai Tidak Dinilai:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Sangat Baik:	1 Indikator
Indikator dengan nilai Baik:	10 Indikator
Indikator dengan nilai Cukup Baik:	8 Indikator
Indikator dengan nilai Kurang Baik:	0 Indikator

Indikator dengan nilai Tidak Baik:	0 Indikator
Modus Nilai Indikator Proses dan Hasil:	Baik
Median Nilai Indikator Proses dan Hasil:	Baik
Rata-rata Nilai Indikator Proses dan Hasil:	
Nilai Faktor yang Dipilih:	Nilai 3 Cukup Memadai

Kesimpulan Penilaian Faktor 2. Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Direksi
Nilai Faktor
Nilai 3 Cukup Memadai
Penjelasan Nilai Faktor
<p>Kondisi telah sepenuhnya terpenuhi dengan struktur dan infrastruktur yang sesuai ketentuan, sehingga proses penerapan tata kelola dilakukan dengan memadai. Hal ini ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang baik, mencerminkan efektivitas dan kepatuhan terhadap standar yang ditetapkan. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> Direksi memenuhi seluruh persyaratan yang harus dipenuhi selama menjabat sesuai dengan ketentuanseluruhnya tugas dan tanggung jawab terlaksana dengan cukup baik namun terdapat kelemahan dalam tugas dan tanggung jawab dan dapat diperbaiki serta hasil kinerja Direksi dapat dipertanggungjawabkan kepada pemegang saham melalui RUPS. Direksi telah melakukan pemenuhan sumber daya manusia dan struktur organisasi, termasuk membentuk satuan kerja atau mengangkat Pejabat Eksekutif dengan kuantitas dan kualitas sesuai dengan ketentuan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Direksi sehingga penyelenggaraan kegiatan usaha pada seluruh jenjang organisasi telah menerapkan prinsip tata kelola dengan cukup baik. Direksi telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi sehingga pelaksanaan tugas dan pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis terlaksana dengan memperhatikan pedomandan tata tertib kerja. Direksi memiliki kemauan dan kemampuan, serta upaya untuk membudayakan pembelajaran sehingga terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan. Direksi sesuai dengan tugas dan tanggung jawab telah melakukan tindak lanjut seluruh temuan audit ataupun pemeriksaan, dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lain namun terdapat temuan berulang yang bersifat administratif.

No	Analisa Faktor Positif dan Negatif
A. Struktur dan Infrastruktur	
1)	Faktor Positif

	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hasil penilaian menunjukkan bahwa indikator Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di wilayah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, BPR tergolong telah terpenuhi. 2. Berdasarkan hasil penilaian, BPR memperlihatkan indikator Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada bank, lembaga jasa keuangan, perusahaan, dan/atau lembaga lain sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, dengan penilaian telah terpenuhi. 3. Berdasarkan hasil penilaian, indikator Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau jasa profesional sebagai tenaga ahli atau konsultan kecuali memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, pada BPR dinilai telah terpenuhi. 4. BPR telah mengimplementasikan indikator Direksi memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab pengelolaan BPR sesuai dengan ketentuan, dengan penilaian telah terpenuhi.
2)	Faktor Negatif
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penilaian terhadap indikator Direksi telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang memuat paling sedikit: a. tugas, tanggung jawab, dan wewenang Direksi; b. pengorganisasian BPR dan pembidangan tugas Direksi; dan c. prosedur pengambilan keputusan Direksi, yang dimiliki BPR adalah sebagian terpenuhi dikarenakan belum disesuaikan dengan kondisi terkini BPR. 2. Berdasarkan hasil penilaian, sebagian anggota Direksi memenuhi persyaratan terkait hubungan keluarga, hubungan keuangan, dan kepemilikan saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, namun terdapat satu pengecualian di mana Direktur Operasional memiliki hubungan keluarga dengan Komisaris Utama. 3. Hasil evaluasi menunjukkan indikator Direksi memastikan pemenuhan sumber daya manusia dan struktur organisasi, termasuk telah membentuk satuan kerja atau menunjuk Pejabat Eksekutif dengan kuantitas dan kualitas yang memadai dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Direksi, pada BPR terdapat kekosongan pejabat eksekutif yang berada dalam kondisi sebagian terpenuhi. 4. Berdasarkan hasil penilaian, Direksi telah menyusun dan menetapkan kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai BPR, namun indikator penerapannya hanya sebagian terpenuhi karena masih terdapat beberapa aspek yang perlu diperbaiki atau disempurnakan untuk memastikan kebijakan tersebut lebih efektif.
B. Proses Penerapan Tata Kelola	
1)	Faktor Positif

	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berdasarkan hasil penilaian, indikator Direksi melaksanakan tugas dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, kehati-hatian, tanggung jawab secara independen, dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang Direksi, pada BPR dinilai baik. 2. Hasil evaluasi menunjukkan indikator Direksi melaksanakan penerapan prinsip tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi, pada BPR berada dalam kondisi cukup baik. 3. BPR telah mengimplementasikan indikator Direksi menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan (termasuk temuan yang bersifat pelanggaran terhadap undang-undang dan temuan berulang) dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas lain, dengan penilaian baik. 4. Indikator Direksi menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada pihak yang berhak memperoleh data dan informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk kepada Dewan Komisaris, pada BPR saat ini dinilai baik. 5. Penilaian terhadap indikator Pengambilan keputusan Direksi yang diambil sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja, yang dimiliki BPR adalah cukup baik. 6. Hasil penilaian menunjukkan bahwa indikator Kebijakan dan keputusan strategis yang diputuskan dalam rapat Direksi memperhatikan pengawasan Dewan Komisaris dan terlebih dahulu dilakukan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat, BPR tergolong baik. 7. Indikator Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS, pada BPR indikator Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/ atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/ atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS, dinilai baik. 8. Implementasi indikator Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan dan bidang lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, di BPR menunjukkan kondisi baik. 9. Penilaian terhadap indikator Direksi telah mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR yang dapat memengaruhi hak dan kewajiban pegawai dalam rangka pencapaian visi dan misi BPR dengan menggunakan media (elektronik dan nonelektronik) yang mudah diakses oleh seluruh pegawai, yang dimiliki BPR adalah cukup baik.
	<ol style="list-style-type: none"> 10. Penilaian terhadap indikator Direksi mengungkapkan: a. kepemilikan saham pada BPR yang bersangkutan dan perusahaan lain; dan b. hubungan keuangan dan/ atau hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lain dan/ atau pemegang saham BPR, yang dimiliki BPR adalah baik. 11. Hasil penilaian menunjukkan bahwa indikator Anggota Direksi mampu menjaga integritas dan reputasi keuangan serta mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, BPR tergolong baik. 12. Berdasarkan hasil penilaian, BPR memperlihatkan indikator Direksi melaksanakan dan mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi secara konsisten, dengan penilaian cukup baik. 13. Indikator Direksi mengevaluasi kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai BPR, pada BPR saat ini dinilai cukup baik.
2)	Faktor Negatif
	PT BPR SINAR MAS PELITA mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.
C. Hasil Penerapan Tata Kelola	

1)	Faktor Positif
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Manajemen BPR telah menilai bahwa indikator Direksi melaksanakan tugas dengan baik dan telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS, berjalan dengan baik. 2. Hasil evaluasi menunjukkan indikator seluruh pegawai mengetahui dan terlibat dalam implementasi atas kebijakan strategis untuk mencapai visi dan misi BPR, pada BPR berada dalam kondisi cukup baik. 3. Berdasarkan hasil penilaian, indikator Keputusan Direksi mengikat dan menjadi tanggung jawab seluruh anggota Direksi, pada BPR dinilai baik. 4. Implementasi indikator Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh Direksi dan ditindaklanjuti sesuai komitmen yang disepakati, di BPR menunjukkan kondisi cukup baik. 5. Hasil evaluasi menunjukkan indikator Terdapat peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian anggota Direksi dalam pengelolaan BPR dan peningkatan pengetahuan seluruh tingkatan atau jenjang organisasi yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja individu, peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders, pada BPR berada dalam kondisi cukup baik. 6. BPR memiliki indikator Direksi menyampaikan laporan- laporan terkait penerapan tata kelola kepada pihak- pihak sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu, indikator Direksi menyampaikan laporan- laporan terkait penerapan tata kelola kepada pihak-pihak sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu, yang dinilai sangat baik.
2)	Faktor Negatif
	PT BPR SINAR MAS PELITA mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.

Faktor 3. Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Dewan Komisaris

No	Kriteria / Indikator	Penilaian	Isian Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur			
1	Jumlah anggota Dewan Komisaris dan Komisaris Independen sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Telah Terpenuhi	<i>Jumlah anggota Dewan Komisaris dan Komisaris Independen telah terpenuhi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, dengan total 3 orang komisaris yang menjabat.</i>
2	Anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di wilayah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Telah Terpenuhi	<i>Seluruh anggota Dewan Komisaris telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dengan bertempat tinggal di provinsi yang sama yaitu Jawa Barat sehingga indikator penerapan di BPR telah terpenuhi.</i>
3	Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris yang paling sedikit memuat: a. tugas, tanggung jawab, dan wewenang Dewan Komisaris; dan b. pengaturan rapat Dewan Komisaris.	Telah Terpenuhi	<i>Berdasarkan hasil penilaian, indikator Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris yang paling sedikit memuat: a. tugas, tanggung jawab, dan wewenang Dewan Komisaris; dan b. pengaturan rapat Dewan Komisaris, pada BPR dinilai telah terpenuhi.</i>
4	Dewan Komisaris tidak melakukan rangkap jabatan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Telah Terpenuhi	<i>BPR telah mengimplementasikan indikator Dewan Komisaris tidak melakukan rangkap jabatan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, dengan penilaian telah terpenuhi.</i>
5	Anggota Dewan Komisaris memenuhi persyaratan terkait dengan hubungan keluarga, hubungan keuangan, dan kepemilikan saham sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Sebagian Terpenuhi	<i>Sebagian anggota Dewan Komisaris memenuhi persyaratan terkait hubungan keluarga, hubungan keuangan, dan kepemilikan saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, namun terdapat satu pengecualian di mana salah satu anggota Dewan Komisaris (Komisaris Utama) memiliki hubungan keluarga dengan Direksi (Direktur Operasional), yang menunjukkan bahwa indikator penerapannya belum sepenuhnya terpenuhi.</i>

6	Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/ atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/ atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat memengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.	Telah Terpenuhi	<i>Seluruh Komisaris Independen telah memenuhi ketentuan tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/ atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/ atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat memengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen. namun terdapat satu Dewan Komisaris yang memiliki hubungan keluarga dengan anggota Direksi dan/atau pemegang saham pengendali, namun tidak memengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen, sehingga indikator penerapan di BPR telah terpenuhi.</i>
7	Anggota Dewan Komisaris memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian agar dapat mengimplementasikan kompetensi yang dimiliki dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan BPR.	Telah Terpenuhi	<i>Hasil evaluasi menunjukkan indikator Anggota Dewan Komisaris memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian agar dapat mengimplementasikan kompetensi yang dimiliki dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan BPR, pada BPR berada dalam kondisi telah terpenuhi.</i>
8	Dewan Komisaris menyusun kebijakan remunerasi dan nominasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris.	Telah Terpenuhi	<i>Indikator Dewan Komisaris menyusun kebijakan remunerasi dan nominasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris, pada BPR saat ini dinilai telah terpenuhi.</i>
B. Proses Penerapan Tata Kelola			
9	Dewan Komisaris melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk kepentingan BPR dengan iktikad baik dan dengan prinsip kehati-hatian, serta tidak memberikan kuasa umum yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang Dewan Komisaris sesuai dengan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan RUPS.	Baik	<i>Implementasi indikator Dewan Komisaris melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk kepentingan BPR dengan iktikad baik dan dengan prinsip kehati-hatian, serta tidak memberikan kuasa umum yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang Dewan Komisaris sesuai dengan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/ atau keputusan RUPS, di BPR menunjukkan kondisi baik.</i>

10	Dewan Komisaris mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola dan manajemen risiko serta kebijakan strategis BPR sesuai ketentuan.	Cukup Baik	<i>Dewan Komisaris telah mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola dan manajemen risiko serta kebijakan strategis BPR dengan cukup baik, meskipun jumlah pertemuan yang dilakukan untuk evaluasi pelaksanaan tata kelola dan manajemen risiko masih terbatas, di BPR menunjukkan kondisi cukup baik.</i>
11	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.	Baik	<i>Berdasarkan hasil penilaian, indikator Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan, pada BPR dinilai baik.</i>
12	Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan (termasuk temuan yang bersifat pelanggaran terhadap undang-undang dan temuan berulang) dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang melaksanakan fungsi audit intern, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/ atau otoritas dan lembaga lain, antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan.	Baik	<i>Berdasarkan hasil penilaian, BPR memperlihatkan indikator Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan (termasuk temuan yang bersifat pelanggaran terhadap undang-undang dan temuan berulang) dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang melaksanakan fungsi audit intern, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/ atau otoritas dan lembaga lain, antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan, dengan penilaian baik.</i>
13	Dewan Komisaris meminta Direksi untuk memberikan penjelasan mengenai permasalahan, kinerja, dan kebijakan operasional BPR.	Baik	<i>Penilaian terhadap indikator Dewan Komisaris meminta Direksi untuk memberikan penjelasan mengenai permasalahan, kinerja, dan kebijakan operasional BPR, yang dimiliki BPR adalah baik.</i>
14	Dewan Komisaris melaksanakan dan mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja anggota Dewan Komisaris secara konsisten.	Baik	<i>Dalam upaya pengembangannya, BPR memiliki indikator Dewan Komisaris melaksanakan dan mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja anggota Dewan Komisaris secara konsisten, dengan pencapaian baik.</i>

15	Dewan Komisaris telah menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.	Baik	<i>BPR telah mengimplementasikan indikator Dewan Komisaris telah menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja, dengan penilaian cukup baik.</i>
16	Dewan Komisaris menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris secara berkala dan pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris telah dilakukan terlebih dahulu dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris.	Baik	<i>Berdasarkan hasil penilaian, indikator Dewan Komisaris menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris secara berkala dan pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris telah dilakukan terlebih dahulu dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris, pada BPR dinilai baik.</i>
17	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/ atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/ atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	Baik	<i>BPR memiliki indikator Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/ atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS, indikator Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/ atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/ atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS, yang dinilai baik.</i>
18	Anggota Dewan Komisaris melakukan pengawasan tugas Direksi dan memastikan Direksi menindaklanjuti hasil pengawasan Dewan Komisaris.	Baik	<i>Manajemen BPR telah menilai bahwa indikator Anggota Dewan Komisaris melakukan pengawasan tugas Direksi dan memastikan Direksi menindaklanjuti hasil pengawasan Dewan Komisaris, berjalan dengan baik.</i>
19	Dewan Komisaris mengajukan kepada RUPS, yang dapat didahului oleh usulan dari komite remunerasi dan nominasi terkait kebijakan remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.	Cukup Baik	<i>BPR tidak menilai indikator Dewan Komisaris mengajukan kepada RUPS, yang dapat didahului oleh usulan dari komite remunerasi dan nominasi terkait kebijakan remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris</i>

20	Dewan Komisaris memastikan pelaksanaan tugas dan melakukan evaluasi atas pelaksanaan tugas komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris.	Cukup Baik	<i>BPR telah membuat surat keputusan tentang komite namun dewan komisaris belum melakukan evaluasi atas pelaksanaan tugas komite, penilaian di BPR cukup baik</i>
21	Dewan Komisaris secara berkala melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.	Baik	<i>Dalam upaya pengembangannya, BPR memiliki indikator Dewan Komisaris secara berkala melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, dengan pencapaian baik.</i>
C. Hasil Penerapan Tata Kelola			
22	Dewan Komisaris melaksanakan tugas dengan baik dan telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS.	Baik	<i>Penilaian terhadap indikator Dewan Komisaris melaksanakan tugas dengan baik dan telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS, yang dimiliki BPR adalah baik.</i>
23	Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.	Baik	<i>Berdasarkan hasil penilaian, indikator Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris, pada BPR dinilai baik.</i>
24	Kebijakan remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris memperhatikan prinsip keadilan dan kewajaran.	Baik	<i>Implementasi indikator Kebijakan remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris memperhatikan prinsip keadilan dan kewajaran, di BPR menunjukkan kondisi baik.</i>
25	Dewan Komisaris menyampaikan laporan-laporan terkait fungsi Dewan Komisaris kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.	Baik	<i>Berdasarkan hasil penilaian, Dewan Komisaris telah menyampaikan laporan-laporan terkait fungsi Dewan Komisaris kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan baik, memenuhi ketentuan yang ditetapkan, meskipun masih ada beberapa aspek yang dapat ditingkatkan untuk memastikan laporan tersebut selalu lengkap, akurat, dan tepat waktu.</i>

26	Terdapat peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian anggota Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja individu, peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders.	Baik	<i>Terdapat peningkatan yang baik dalam kemampuan, pengalaman, dan keahlian anggota Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan BPR, yang tercermin dari peningkatan kinerja individu, kinerja BPR yang lebih baik, penyelesaian permasalahan yang dihadapi, serta pencapaian hasil yang sesuai dengan ekspektasi stakeholders.</i>
Ringkasan Penilaian Struktur dan Infrastruktur			
Indikator dengan nilai Tidak Dinilai:		0 Indikator	
Indikator dengan nilai Telah Terpenuhi:		7 Indikator	
Indikator dengan nilai Sebagian Terpenuhi:		1 Indikator	
Indikator dengan nilai Belum Terpenuhi:		0 Indikator	
Kesimpulan Penilaian Struktur dan Infrastruktur:		Telah Terpenuhi	
Ringkasan Penilaian Proses dan Hasil			
Indikator dengan nilai Tidak Dinilai:		0 Indikator	
Indikator dengan nilai Sangat Baik:		0 Indikator	
Indikator dengan nilai Baik:		15 Indikator	
Indikator dengan nilai Cukup Baik:		3 Indikator	
Indikator dengan nilai Kurang Baik:		0 Indikator	
Indikator dengan nilai Tidak Baik:		0 Indikator	
Modus Nilai Indikator Proses dan Hasil:		Baik	
Median Nilai Indikator Proses dan Hasil:		Baik	
Rata-rata Nilai Indikator Proses dan Hasil:			
Nilai Faktor yang Dipilih:		Nilai 3 Cukup Memadai	
Kesimpulan Penilaian Faktor 3. Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Dewan Komisaris			
Nilai Faktor			
Nilai 3 Cukup Memadai			
Penjelasan Nilai Faktor			

Apabila memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan cukup memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang cukup baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain:

- Dewan Komisaris memenuhi seluruh persyaratan yang harus dipenuhi selama menjabat sesuai dengan ketentuan sehingga pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, termasuk pengambilan keputusan berjalan dengan cukup baik serta hasil kinerja Dewan Komisaris dapat dipertanggungjawabkan kepada pemegang saham melalui RUPS.
- Dewan Komisaris telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja anggota Dewan Komisaris sehingga pelaksanaan tugas dan pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris terlaksana dengan memperhatikan pedoman dan tata tertib kerja.
- Dewan Komisaris memiliki kemauan dan kemampuan, serta upaya untuk membudayakan pembelajaran, sehingga terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan.
- Dewan Komisaris telah memiliki kebijakan remunerasi dan nominasi sehingga pelaksanaan tugas terlaksana dengan memperhatikan kebijakan remunerasi dan nominal.

No	Analisa Faktor Positif dan Negatif
A. Struktur dan Infrastruktur	
1)	Faktor Positif
	<ol style="list-style-type: none"> BPR menilai indikator Jumlah anggota Dewan Komisaris dan Komisaris Independen telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan seluruh anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal pada satu provinsi yang sama, pada BPR dinilai telah terpenuhi Berdasarkan hasil penilaian, indikator Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris yang paling sedikit memuat: a. tugas, tanggung jawab, dan wewenang Dewan Komisaris; dan b. pengaturan rapat Dewan Komisaris, pada BPR dinilai telah terpenuhi. BPR telah mengimplementasikan indikator Dewan Komisaris tidak melakukan rangkap jabatan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, dengan penilaian telah terpenuhi. BPR tidak menilai indikator Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/ atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat memengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen, maka nilai BPR saat ini telah terpenuhi. Hasil evaluasi menunjukkan indikator Anggota Dewan Komisaris memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian agar dapat mengimplementasikan kompetensi yang dimiliki dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan BPR, pada BPR berada dalam kondisi telah terpenuhi. Indikator Dewan Komisaris menyusun kebijakan remunerasi dan nominasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris, pada BPR saat ini dinilai telah terpenuhi.
2)	Faktor Negatif
	<ol style="list-style-type: none"> Berdasarkan hasil penilaian, indikator Anggota Dewan Komisaris sebagian memenuhi persyaratan terkait dengan hubungan keluarga, hubungan keuangan, dan kepemilikan saham sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, pada BPR dinilai sebagian terpenuhi.
B. Proses Penerapan Tata Kelola	
1)	Faktor Positif

	<ol style="list-style-type: none"> 1. Implementasi indikator Dewan Komisaris melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk kepentingan BPR dengan iktikad baik dan dengan prinsip kehati-hatian, serta tidak memberikan kuasa umum yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang Dewan Komisaris sesuai dengan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/ atau keputusan RUPS, di BPR menunjukkan kondisi baik. 2. Implementasi indikator Dewan Komisaris mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola dan manajemen risiko serta kebijakan strategis BPR sesuai ketentuan, di BPR menunjukkan kondisi cukup baik. 3. Berdasarkan hasil penilaian, indikator Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan, pada BPR dinilai baik. 4. Berdasarkan hasil penilaian, BPR memperlihatkan indikator Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan (termasuk temuan yang bersifat pelanggaran terhadap undang-undang dan temuan berulang) dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang melaksanakan fungsi audit intern, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas dan lembaga lain, antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan, dengan penilaian baik. 5. Penilaian terhadap indikator Dewan Komisaris meminta Direksi untuk memberikan penjelasan mengenai permasalahan, kinerja, dan kebijakan operasional BPR, yang dimiliki BPR adalah baik. 6. Dalam upaya pengembangannya, BPR memiliki indikator Dewan Komisaris melaksanakan dan mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja anggota Dewan Komisaris secara konsisten, dengan pencapaian baik. 7. BPR telah mengimplementasikan indikator Dewan Komisaris telah menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja, dengan penilaian cukup baik.
	<ol style="list-style-type: none"> 8. Berdasarkan hasil penilaian, indikator Dewan Komisaris menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris secara berkala dan pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris telah dilakukan terlebih dahulu dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris, pada BPR dinilai baik. 9. BPR memiliki indikator Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/ atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/ atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS, indikator Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/ atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS, yang dinilai baik. 10. Manajemen BPR telah menilai bahwa indikator Anggota Dewan Komisaris melakukan pengawasan tugas Direksi dan memastikan Direksi menindaklanjuti hasil pengawasan Dewan Komisaris, berjalan dengan baik. 11. BPR menilai indikator Dewan Komisaris mengajukan kepada RUPS, yang dapat didahului oleh usulan dari komite remunerasi dan nominasi terkait kebijakan remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, pada BPR fungsi dan tugas komite belum berjalan sehingga nilainya cukup baik. 12. BPR menilai indikator Dewan Komisaris belum sepenuhnya memastikan pelaksanaan tugas dan melakukan evaluasi atas pelaksanaan tugas komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris, penilaian cukup baik. 13. Dalam upaya pengembangannya, BPR memiliki indikator Dewan Komisaris secara berkala melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, dengan pencapaian baik.

2)	Faktor Negatif
	PT BPR SINAR MAS PELITA mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.
C. Hasil Penerapan Tata Kelola	
1)	Faktor Positif
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penilaian terhadap indikator Dewan Komisaris melaksanakan tugas dengan baik dan telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS, yang dimiliki BPR adalah baik. 2. Berdasarkan hasil penilaian, indikator Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris, pada BPR dinilai baik. 3. Implementasi indikator Kebijakan remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris memperhatikan prinsip keadilan dan kewajaran, di BPR menunjukkan kondisi baik. 4. Berdasarkan hasil penilaian, BPR memperlihatkan indikator Dewan Komisaris menyampaikan laporan-laporan terkait fungsi Dewan Komisaris kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu, dengan penilaian baik. 5. Indikator Terdapat peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian anggota Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja individu, peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders, pada BPR saat ini dinilai baik.
2)	Faktor Negatif
	PT BPR SINAR MAS PELITA mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.

Faktor 4. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite

Tidak ada penilaian untuk faktor ini.

Faktor 5. Penanganan Benturan Kepentingan

No	Kriteria / Indikator	Penilaian	Isian Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur			
1	BPR memiliki kebijakan benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR, termasuk pengungkapan benturan kepentingan, penanganan benturan kepentingan, administrasi, dan dokumentasi.	Sebagian Terpenuhi	<i>BPR telah memiliki kebijakan benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai, termasuk pengungkapan, penanganan, administrasi, dan dokumentasi, namun indikator penerapannya masih sebagian terpenuhi karena kebijakan tersebut masih terlalu sederhana dan perlu dikaji ulang sesuai dengan ketentuan terkini.</i>
B. Proses Penerapan Tata Kelola			
2	Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai mengungkapkan benturan kepentingan dalam setiap keputusan yang memenuhi kondisi adanya benturan kepentingan, menangani benturan kepentingan, dan tidak mengambil tindakan yang berpotensi merugikan atau mengurangi keuntungan BPR sesuai dengan kebijakan benturan kepentingan.	Cukup Baik	<i>Penilaian terhadap indikator Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai mengungkapkan benturan kepentingan dalam setiap keputusan yang memenuhi kondisi adanya benturan kepentingan, menangani benturan kepentingan, dan tidak mengambil tindakan yang berpotensi merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, penilaian yang dimiliki BPR adalah cukup baik</i>
C. Hasil Penerapan Tata Kelola			
3	Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai menghindari diri dari segala bentuk benturan kepentingan, termasuk potensi benturan kepentingan.	Cukup Baik	<i>Dalam hal Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai telah berupaya untuk menghindari diri dari segala bentuk benturan kepentingan, termasuk potensi benturan kepentingan, meskipun masih terdapat beberapa situasi di mana pengawasan dan kesadaran perlu ditingkatkan untuk memastikan penerapan yang lebih konsisten., pada BPR saat ini dinilai cukup baik.</i>
4	Benturan kepentingan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dan diselesaikan dalam setiap keputusan serta telah terdokumentasi dengan baik.	Baik	<i>BPR telah mengimplementasikan indikator benturan kepentingan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan dengan baik, di mana setiap benturan kepentingan diungkapkan dan diselesaikan dalam setiap keputusan. namun BPR baru</i>

			<i>membuat lembar dokumentasi yang sistematis untuk mencatat dan mengelola setiap kasus benturan kepentingan, sehingga memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengambilan keputusan. Penilaian terhadap penerapan ini menunjukkan hasil yang baik.</i>
5	BPR berhasil menangani benturan kepentingan dengan baik.	Cukup Baik	<i>BPR berhasil menangani benturan kepentingan dengan hasil indikator yang cukup baik, menunjukkan upaya yang efektif dalam mengidentifikasi dan mengelola potensi konflik kepentingan, indikator penerapannya cukup baik</i>
Ringkasan Penilaian Struktur dan Infrastruktur			
Indikator dengan nilai Tidak Dinilai:		0 Indikator	
Indikator dengan nilai Telah Terpenuhi:		0 Indikator	
Indikator dengan nilai Sebagian Terpenuhi:		1 Indikator	
Indikator dengan nilai Belum Terpenuhi:		0 Indikator	
Kesimpulan Penilaian Struktur dan Infrastruktur:		Sebagian Terpenuhi	
Ringkasan Penilaian Proses dan Hasil			
Indikator dengan nilai Tidak Dinilai:		0 Indikator	
Indikator dengan nilai Sangat Baik:		0 Indikator	
Indikator dengan nilai Baik:		2 Indikator	
Indikator dengan nilai Cukup Baik:		2 Indikator	
Indikator dengan nilai Kurang Baik:		0 Indikator	
Indikator dengan nilai Tidak Baik:		0 Indikator	
Modus Nilai Indikator Proses dan Hasil:		Cukup Baik	
Median Nilai Indikator Proses dan Hasil:		Cukup Baik	
Rata-rata Nilai Indikator Proses dan Hasil:			
Nilai Faktor yang Dipilih:		Nilai 3 Cukup Memadai	
Kesimpulan Penilaian Faktor 5. Penanganan Benturan Kepentingan			
Nilai Faktor			
Nilai 3 Cukup Memadai			
Penjelasan Nilai Faktor			

Apabila memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan cukup memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang cukup baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain:

- a. Masing-masing komite memenuhi seluruh persyaratan yang harus dipenuhi selama menjabat sesuai dengan ketentuan sehingga tugas dan tanggung jawab terlaksana dengan cukup baik namun terdapat kelemahan dalam tugas dan tanggung jawab dan dapat diperbaiki serta hasil kinerja komite dapat dipertanggungjawabkan kepada Dewan Komisaris dan Direksi.
- b. Masing-masing komite telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja komite sehingga pelaksanaan tugas terlaksana dengan memperhatikan pedoman dan tata tertib kerja.

No	Analisa Faktor Positif dan Negatif
A. Struktur dan Infrastruktur	
1)	Faktor Positif
	1. Implementasi indikator BPR memiliki kebijakan benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR, termasuk pengungkapan benturan kepentingan, penanganan benturan kepentingan, administrasi, dan dokumentasi namun kebijakan tersebut masih terlalu sederhana dan perlu dikaji ulang sesuai dengan ketentuan terkini, di BPR menunjukkan kondisi sebagian terpenuhi
2)	Faktor Negatif
	PT BPR SINAR MAS PELITA mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.
B. Proses Penerapan Tata Kelola	
1)	Faktor Positif
	1. Penilaian terhadap indikator Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai mengungkapkan benturan kepentingan dalam setiap keputusan yang memenuhi kondisi adanya benturan kepentingan, menangani benturan kepentingan, dan tidak mengambil tindakan yang berpotensi merugikan atau mengurangi keuntungan BPR sesuai dengan kebijakan benturan kepentingan, yang dimiliki BPR adalah cukup baik.
2)	Faktor Negatif
	PT BPR SINAR MAS PELITA mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.
C. Hasil Penerapan Tata Kelola	
1)	Faktor Positif
	1. BPR telah mengimplementasikan indikator Benturan kepentingan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dan diselesaikan dalam setiap keputusan serta telah terdokumentasi dengan baik, dengan penilaian baik. 2. Indikator Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai menghindarkan diri dari segala bentuk benturan kepentingan, termasuk potensi benturan kepentingan, pada BPR saat ini dinilai cukup baik. 3. Implementasi indikator BPR berhasil menangani benturan kepentingan dengan baik, di BPR menunjukkan kondisi cukup baik.
2)	Faktor Negatif
	PT BPR SINAR MAS PELITA mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.

Faktor 6. Penerapan Fungsi Kepatuhan

No	Kriteria / Indikator	Penilaian	Isian Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur			
1	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Telah Terpenuhi	<i>Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, yang bekerja secara independen dan tidak membawahkan bagian operasional seperti penghimpunan dan penyaluran dana sebagaimana ketentuan berlaku. dengan pencapaian terpenuhi seluruhnya.</i>
2	BPR memiliki satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan sesuai permodalan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Sebagian Terpenuhi	<i>BPR memiliki satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan; namun, indikator penerapannya hanya sebagian terpenuhi karena terdapat kekosongan pada posisi pejabat eksekutif sejak pejabat sebelumnya meninggal dunia pada Oktober 2024.</i>
3	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan telah menyusun dan/ atau menginiskan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan.	Telah Terpenuhi	<i>Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan telah berhasil menyusun dan mengimplementasikan pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan, sehingga indikator penerapannya telah terpenuhi dengan baik.</i>
4	BPR telah menyediakan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai pada satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan untuk menyelesaikan tugas secara efektif.	Sebagian Terpenuhi	<i>BPR telah menyediakan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai pada satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan; namun, indikator penerapannya hanya sebagian terpenuhi karena masih terdapat beberapa posisi yang belum terisi, yang dapat mempengaruhi efektivitas penyelesaian tugas.</i>
B. Proses Penerapan Tata Kelola			

5	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan merumuskan strategi untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui penyusunan kebijakan kepatuhan yang berorientasi pada visi, misi, dan nilai perusahaan, serta sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.	Baik	<i>Dalam upaya pengembangannya, BPR memiliki indikator Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan merumuskan strategi untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui penyusunan kebijakan kepatuhan yang berorientasi pada visi, misi, dan nilai perusahaan, serta sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini, dengan pencapaian baik.</i>
6	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memastikan kegiatan usaha BPR telah memenuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan.	Cukup Baik	<i>Implementasi indikator Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memastikan bahwa kegiatan usaha BPR telah memenuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan indikator penerapannya yang cukup baik</i>
7	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan.	Cukup Baik	<i>Implementasi indikator Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan, di BPR menunjukkan kondisi cukup baik.</i>
C. Hasil Penerapan Tata Kelola			
8	BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan.	Cukup Baik	<i>Manajemen BPR telah menilai bahwa indikator BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan, dengan hasil yang cukup baik; meskipun demikian, masih terdapat pelanggaran yang berulang, menunjukkan perlunya upaya lebih lanjut untuk meningkatkan kepatuhan dan mencegah terjadinya pelanggaran di masa mendatang.</i>
9	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan- laporan terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.	Cukup Baik	<i>Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan-laporan terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan kriteria yang cukup baik; meskipun laporan tersebut umumnya lengkap, akurat, dan tepat waktu, namun masih perlu diperbaiki untuk memastikan kesempurnaan dan kepatuhan yang lebih tinggi, nilai pada BPR cukup baik</i>
Ringkasan Penilaian Struktur dan Infrastruktur			
Indikator dengan nilai Tidak Dinilai:		0 Indikator	
Indikator dengan nilai Telah Terpenuhi:		2 Indikator	

Indikator dengan nilai Sebagian Terpenuhi:	2 Indikator
Indikator dengan nilai Belum Terpenuhi:	0 Indikator
Kesimpulan Penilaian Struktur dan Infrastruktur:	Sebagian Terpenuhi
Ringkasan Penilaian Proses dan Hasil	
Indikator dengan nilai Tidak Dinilai:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Sangat Baik:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Baik:	1 Indikator
Indikator dengan nilai Cukup Baik:	4 Indikator
Indikator dengan nilai Kurang Baik:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Tidak Baik:	0 Indikator
Modus Nilai Indikator Proses dan Hasil:	Cukup Baik
Median Nilai Indikator Proses dan Hasil:	Cukup Baik
Rata-rata Nilai Indikator Proses dan Hasil:	
Nilai Faktor yang Dipilih:	Nilai 3 Cukup Memadai
Kesimpulan Penilaian Faktor 6. Penerapan Fungsi Kepatuhan	
Nilai Faktor	
Nilai 3 Cukup Memadai	
Penjelasan Nilai Faktor	
<p>Apabila memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan cukup memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang cukup baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi seluruh persyaratan yang harus dipenuhi selama menjabat sesuai dengan ketentuan sehingga pelaksanaan tugas dan tanggung jawab berjalan dengan cukup baik serta hasil kinerja anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan dapat dipertanggungjawabkan kepada direktur utama atau Dewan Komisaris (bagi Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan adalah direktur utama) dan cukup berhasil menurunkan tingkat pelanggaran. Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan telah membentuk satuan kerja atau mengangkat Pejabat Eksekutif namun belum dapat mendukung sepenuhnya pelaksanaan tugas dan fungsi Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan sehingga penerapan prinsip tata kelola belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan maupun pedoman internal dan tata tertib kerja. Satuan kerja kepatuhan dan Pejabat Eksekutif yang membawahkan fungsi kepatuhan telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja sehingga pelaksanaan tugas terlaksana dengan memperhatikan pedoman dan tata tertib kerja. 	
No	Analisa Faktor Positif dan Negatif
A. Struktur dan Infrastruktur	
1)	Faktor Positif

	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dalam upaya pengembangannya, BPR memiliki indikator Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, dengan pencapaian sebagian terpenuhi. 2. Berdasarkan hasil penilaian, BPR memperlihatkan indikator Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan telah menyusun dan/ atau menginikan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan, dengan penilaian telah terpenuhi.
2)	Faktor Negatif
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Implementasi indikator BPR memiliki satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan sesuai permodalan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, di BPR menunjukkan kondisi sebagian terpenuhi, dikarenakan terdapat kekosongan pada posisi pejabat eksekutif kepatuhan. 2. Implementasi indikator BPR telah menyediakan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai pada satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan untuk menyelesaikan tugas secara efektif, di BPR menunjukkan kondisi sebagian terpenuhi.
B. Proses Penerapan Tata Kelola	
1)	Faktor Positif
	<ol style="list-style-type: none"> 1. BPR memiliki indikator Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan merumuskan strategi untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui penyusunan kebijakan kepatuhan yang berorientasi pada visi, misi, dan nilai perusahaan, serta sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini, dengan pencapaian baik. 2. Penilaian terhadap indikator Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memastikan kegiatan usaha BPR telah memenuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan, yang dimiliki BPR adalah cukup baik. 3. Implementasi indikator Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan, di BPR menunjukkan kondisi cukup baik.
2)	Faktor Negatif
	PT BPR SINAR MAS PELITA mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.
C. Hasil Penerapan Tata Kelola	
1)	Faktor Positif
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Manajemen BPR telah menilai bahwa indikator BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan, berjalan dengan cukup baik. 2. Dalam upaya pengembangannya, BPR memiliki indikator Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan-laporan terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu, dengan pencapaian cukup baik.
2)	Faktor Negatif
	PT BPR SINAR MAS PELITA mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.

Faktor 7. Penerapan Fungsi Audit Intern

No	Kriteria / Indikator	Penilaian	Isian Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur			
1	BPR memiliki satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern sesuai permodalan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Telah Terpenuhi	<i>BPR memiliki satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern sesuai dengan permodalan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, dan indikator penerapannya telah terpenuhi dengan baik</i>
2	Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern telah memiliki dan menginikan pedoman dan tata tertib kerja sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan serta telah disetujui oleh direktur utama dan Dewan Komisaris.	Telah Terpenuhi	<i>Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern telah berhasil memiliki dan mengimplementasikan pedoman serta tata tertib kerja sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, yang juga telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris, sehingga indikator penerapannya telah terpenuhi dengan baik.</i>
3	Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern independen terhadap fungsi operasional.	Telah Terpenuhi	<i>Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern telah beroperasi secara independen terhadap fungsi operasional, sehingga indikator penerapannya telah terpenuhi dengan baik, memastikan bahwa proses audit dilakukan tanpa adanya pengaruh atau intervensi dari pihak manapun, yang mendukung objektivitas dan integritas hasil audit.</i>
4	Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada direktur utama.	Telah Terpenuhi	<i>Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama, dan indikator penerapannya telah terpenuhi dengan baik</i>
5	BPR telah menyediakan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai pada satuan kerja atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan audit intern untuk menyelesaikan tugas secara efektif.	Telah Terpenuhi	<i>BPR telah menyediakan sumber daya manusia namun masih terbatas pada satuan kerja atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan audit intern dengan mendukung pencapaian tujuan pengawasan dan pengendalian internal yang optimal, sehingga indikator penerapannya telah terpenuhi dengan baik.</i>
B. Proses Penerapan Tata Kelola			



6	BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat memengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat.	Cukup Baik	<i>BPR belum sepenuhnya menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang dapat memengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat dikarenakan belum menyesuaikan dengan kondisi spesifik BPR, sehingga penilaian cukup baik.</i>
7	BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang yang memuat pendapat tentang hasil kerja satuan kerja audit intern dan kepatuhannya terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern.	Baik	<i>BPR telah menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang yang memuat pendapat tentang hasil kerja satuan kerja audit intern dan kepatuhannya terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern yang telah dilakukan untuk pertama kalinya setelah merger periode 2019 hingga 2021 dan pada tahun 2024 kaji ulang tersebut telah dilaksanakan pada bulan September 2024, indikator penerapannya dinilai baik</i>
8	Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara independen dan memadai yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.	Cukup Baik	<i>Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara independen dan cukup memadai, mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit, meskipun masih perlu perbaikan dalam Penyusunan Rencana Audit dengan mencantumkan evaluasi temuan audit sebelumnya, menetapkan kertas kerja yang baku yang berisi penelitian pendahuluan dan analisa data, serta form komunikasi audit (antara PE SKAI dan anggota) saat rapat pendahuluan pelaporan hasil audit untuk memastikan bahwa informasi yang disampaikan lebih jelas, akurat, dan mudah dipahami oleh semua pihak yang berkepentingan, sehingga indikator penerapannya dinilai cukup baik</i>
9	BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.	Baik	<i>BPR belum sepenuhnya melaksanakan peningkatan mutu keterampilan SDM terkait dengan penerapan fungsi audit intern secara berkala dan berkesinambungan. Dalam semester 2 tahun 2024 sudah mengikuti 4 agenda pelatihan terkait penerapan fungsi audit intern nilai</i>

			<i>indikator penerapan cukup baik.</i>
C. Hasil Penerapan Tata Kelola			
10	BPR mempresentasikan rencana dan realisasi program audit tahunan sesuai permintaan Otoritas Jasa Keuangan.	Cukup Baik	<i>BPR mempresentasikan rencana dan realisasi program audit tahunan sesuai permintaan Otoritas Jasa Keuangan, meskipun masih terdapat ruang untuk peningkatan dalam hal transparansi dan detail informasi yang disampaikan, agar dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai efektivitas dan pencapaian program audit yang telah dilaksanakan. indikator penerapannya cukup baik</i>
11	BPR menyampaikan laporan terkait pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dantepat waktu.	Baik	<i>Ditinjau dari sisi regulasi, BPR sudah menyampaikan laporan pelaksanaan pokok-pokok hasil audit intern dan laporan khusus terkait fraud kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan., indikator penerapannya baik.</i>
Ringkasan Penilaian Struktur dan Infrastruktur			
Indikator dengan nilai Tidak Dinilai:		0 Indikator	
Indikator dengan nilai Telah Terpenuhi:		5 Indikator	
Indikator dengan nilai Sebagian Terpenuhi:		0 Indikator	
Indikator dengan nilai Belum Terpenuhi:		0 Indikator	
Kesimpulan Penilaian Struktur dan Infrastruktur:		Terpenuhi Secara Keseluruhan	
Ringkasan Penilaian Proses dan Hasil			
Indikator dengan nilai Tidak Dinilai:		0 Indikator	
Indikator dengan nilai Sangat Baik:		0 Indikator	
Indikator dengan nilai Baik:		3 Indikator	
Indikator dengan nilai Cukup Baik:		3 Indikator	
Indikator dengan nilai Kurang Baik:		0 Indikator	
Indikator dengan nilai Tidak Baik:		0 Indikator	
Modus Nilai Indikator Proses dan Hasil:		Cukup Baik	
Median Nilai Indikator Proses dan Hasil:		Cukup Baik	
Rata-rata Nilai Indikator Proses dan Hasil:			

Nilai Faktor yang Dipilih:		Nilai 2 Memadai
Kesimpulan Penilaian Faktor 7. Penerapan Fungsi Audit Intern		
Nilai Faktor		
Nilai 2 Memadai		
Penjelasan Nilai Faktor		
<p>Memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/ atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain:</p> <p>a. Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern memenuhi seluruh persyaratan yang harus dipenuhi selama menjabat sesuai dengan ketentuan sehingga pelaksanaan tugas dan tanggung jawab berjalan dengan baik serta hasil kinerja satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif dapat dipertanggungjawabkan kepada direktur utama dan penyampaian laporan dilakukan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.</p> <p>b. Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern telah memiliki dan menginikan pedoman dan tata tertib kerja sehingga pelaksanaan tugas terlaksana dengan memperhatikan pedoman dan tata tertib kerja.</p>		
No	Analisa Faktor Positif dan Negatif	
A. Struktur dan Infrastruktur		
1)	Faktor Positif	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. BPR memiliki indikator BPR memiliki satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern sesuai permodalan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, indikator BPR memiliki satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern sesuai permodalan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, yang dinilai telah terpenuhi. 2. Indikator Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern telah memiliki dan menginikan pedoman dan tata tertib kerja sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan serta telah disetujui oleh direktur utama dan Dewan Komisaris, pada BPR saat ini dinilai telah terpenuhi. 3. BPR memiliki indikator Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern independen terhadap fungsi operasional, indikator Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern independen terhadap fungsi operasional, yang dinilai telah terpenuhi. 4. Dalam upaya pengembangannya, BPR memiliki indikator Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada direktur utama, dengan pencapaian telah terpenuhi. 5. BPR memiliki indikator BPR telah menyediakan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai pada satuan kerja atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan audit intern untuk menyelesaikan tugas secara efektif, indikator BPR telah menyediakan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai pada satuan kerja atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan audit intern untuk menyelesaikan tugas secara efektif, yang dinilai telah terpenuhi. 	
2)	Faktor Negatif	
	PT BPR SINAR MAS PELITA mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.	
B. Proses Penerapan Tata Kelola		
1)	Faktor Positif	

	1. BPR telah mengimplementasikan indikator BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan
	<p>pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat memengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat, dengan penilaian cukup baik.</p> <p>2. BPR telah menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang yang memuat pendapat tentang hasil kerja satuan kerja audit intern dan kepatuhannya terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern, dengan penilaian baik</p> <p>3. Ditinjau dari sisi regulasi, indikator Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara independen dan memadai yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit, yang dimiliki BPR dinilai baik.</p> <p>4. Hasil evaluasi menunjukkan indikator BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern, pada BPR berada dalam kondisi baik.</p>
2)	Faktor Negatif
	PT BPR SINAR MAS PELITA mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.
C. Hasil Penerapan Tata Kelola	
1)	Faktor Positif
	<p>1. Dalam upaya pengembangannya, BPR memiliki indikator BPR mempresentasikan rencana dan realisasi program audit tahunan sesuai permintaan Otoritas Jasa Keuangan, dengan pencapaian cukup baik.</p> <p>2. Ditinjau dari sisi regulasi, indikator BPR menyampaikan laporan terkait pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dantepat waktu, yang dimiliki BPR dinilai baik.</p>
2)	Faktor Negatif
	PT BPR SINAR MAS PELITA mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.

Faktor 8. Penerapan Fungsi Audit Ekstern

No	Kriteria / Indikator	Penilaian	Isian Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur			
1	Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) telah memenuhi aspek- aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, target waktu penyelesaian audit, komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP, dan mempertimbangkan kompetensi dari KAP (termasuk Akuntan Publik) yang memadai.	Telah Terpenuhi	<i>Manajemen BPR telah menilai bahwa indikator Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) telah memenuhi aspek- aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, target waktu penyelesaian audit, komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP, dan mempertimbangkan kompetensi dari KAP (termasuk Akuntan Publik) yang memadai, berjalan dengan telah terpenuhi.</i>
B. Proses Penerapan Tata Kelola			
2	Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris dan memperhatikan rekomendasi komite audit (bagi BPR yang telah memiliki komite audit).	Baik	<i>Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR Sinar Mas Pelita telah menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris. dinilai baik.</i>
3	BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan management letter kepada Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu.	Baik	<i>BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan Management Letter atas pemeriksaan 2023 pada semester I 2024 kepada Otoritas Jasa Keuangan. Dan pemeriksaan tahun 2024 masih berjalan, indikator penilaiannya baik.</i>
C. Hasil Penerapan Tata Kelola			
4	Hasil audit dan management letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan menyajikan informasi keuangan yang transparan dan berkualitas.	Baik	<i>BPR telah mengimplementasikan Hasil audit dan management letter yang telah menggambarkan permasalahan BPR dan menyajikan informasi keuangan yang transparan dan berkualitas, dengan penilaian baik.</i>
5	Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Baik	<i>Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, pada BPR indikator Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, dinilai baik.</i>

Ringkasan Penilaian Struktur dan Infrastruktur	
Indikator dengan nilai Tidak Dinilai:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Telah Terpenuhi:	1 Indikator
Indikator dengan nilai Sebagian Terpenuhi:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Belum Terpenuhi:	0 Indikator
Kesimpulan Penilaian Struktur dan Infrastruktur:	Terpenuhi Secara Keseluruhan
Ringkasan Penilaian Proses dan Hasil	
Indikator dengan nilai Tidak Dinilai:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Sangat Baik:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Baik:	4 Indikator
Indikator dengan nilai Cukup Baik:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Kurang Baik:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Tidak Baik:	0 Indikator
Modus Nilai Indikator Proses dan Hasil:	Baik
Median Nilai Indikator Proses dan Hasil:	Baik
Rata-rata Nilai Indikator Proses dan Hasil:	Baik
Nilai Faktor yang Dipilih:	Nilai 1 Sangat Memadai
Kesimpulan Penilaian Faktor 8. Penerapan Fungsi Audit Ekstern	
Nilai Faktor	
Nilai 1 Sangat Memadai	
Penjelasan Nilai Faktor	
<p>Memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/ atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain: Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan KAP telah memenuhi seluruh persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan namun hasil audit Akuntan Publik dan KAP dan management letter disampaikan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu, serta hasil audit hanya menggambarkan seluruh permasalahan BPR.</p>	
No	Analisa Faktor Positif dan Negatif

A. Struktur dan Infrastruktur	
1)	Faktor Positif
	1. Manajemen BPR telah menilai bahwa indikator Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) telah memenuhi aspek- aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, target waktu penyelesaian audit, komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP, dan mempertimbangkan kompetensi dari KAP (termasuk Akuntan Publik) yang memadai, berjalan dengan telah terpenuhi.
2)	Faktor Negatif
	PT BPR SINAR MAS PELITA mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.
B. Proses Penerapan Tata Kelola	
1)	Faktor Positif
	1. Indikator Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris dan memperhatikan rekomendasi komite audit (bagi BPR yang telah memiliki komite audit), pada BPR indikator Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris dan memperhatikan rekomendasi komite audit (bagi BPR yang telah memiliki komite audit), dinilai baik. 2. Manajemen BPR telah menilai bahwa indikator BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan management letter kepada Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu, berjalan dengan baik.
2)	Faktor Negatif
	PT BPR SINAR MAS PELITA mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.
C. Hasil Penerapan Tata Kelola	
1)	Faktor Positif
	1. BPR telah mengimplementasikan indikator Hasil audit dan management letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan menyajikan informasi keuangan yang transparan dan berkualitas, dengan penilaian baik. 2. Indikator Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, pada BPR indikator Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, dinilai baik.
2)	Faktor Negatif
	PT BPR SINAR MAS PELITA mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.

Faktor 9. Penerapan Manajemen Risiko dan Strategi Anti Fraud

No	Kriteria / Indikator	Penilaian	Isian Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur			
1	BPR memiliki komite, satuan kerja, dan/atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko sesuai dengan permodalan, termasuk fungsi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Sebagian Terpenuhi	<i>BPR memiliki satuan kerja, dan/atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko sesuai dengan permodalan, termasuk fungsi anti fraud, program anti pencucian uang, dan pencegahan pendanaan terorisme sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan; dan untuk komite manajemen risiko yang telah dibentuk BPR telah dicabut kembali berkenaan dengan modal inti yang berada di bawah 80 miliar, indikator penerapannya hanya sebagian terpenuhi</i>
2	BPR memiliki dan mengingkan kebijakan manajemen risiko, prosedur manajemen risiko, dan penetapan limit risiko.	Sebagian Terpenuhi	<i>BPR memiliki kebijakan manajemen risiko, prosedur manajemen risiko, dan penetapan limit risiko, namun masih ada yang perlu di kinikan atau disesuaikan dengan kondisi terkini sesuai ketentuan yang berlaku, nilai penerapannya sebagian terpenuhi.</i>
3	BPR memiliki dan mengingkan kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	Sebagian Terpenuhi	<i>BPR memiliki dan mengingkan kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai dengan ketentuan yang berlaku namun belum menyesuaikan kondisi terkini, pada BPR berada dalam kondisi tsebagian terpenuhi.</i>
B. Proses Penerapan Tata Kelola			
4	Komite, satuan kerja, dan/ atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko sesuai dengan permodalan, termasuk fungsi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan kebijakan dan prosedur berdasarkan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Cukup Baik	<i>Komite, satuan kerja, dan/atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko sesuai dengan permodalan, termasuk fungsi anti fraud, program anti pencucian uang, dan pencegahan pendanaan terorisme, melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan kebijakan dan prosedur berdasarkan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, menunjukkan bahwa masih ada beberapa aspek yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan seperti mengadopsi sistem teknologi informasi yang lebih canggih untuk</i>

			<i>memantau dan mengelola risiko secara real-time, indikator penerapannya masih dinilai cukup baik.</i>
5	Direksi: a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan manajemen risiko secara tertulis; b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi; c. melakukan kebijakan dan strategi manajemen risiko dengan baik; dan d. memastikan penerapan serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan strategi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.	Baik	<i>Manajemen BPR telah menilai bahwa indikator Direksi: a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan manajemen risiko secara tertulis; b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi; c. melakukan kebijakan dan strategi manajemen risiko dengan baik; dan d. memastikan penerapan serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan strategi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme serta melakukan evaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi dalam bentuk kajian dan rekomendasi., berjalan dengan baik.</i>
6	Dewan Komisaris: a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan manajemen risiko; b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko; c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris; d. melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko; dan e. memastikan penerapan serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan strategi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.	Baik	<i>Berdasarkan hasil penilaian, indikator Dewan Komisaris: a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan manajemen risiko; b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko; c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris; d. melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko; dan e. memastikan penerapan serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan strategi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme, pada BPR dinilai baik.</i>
7	BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko terhadap seluruh risiko.	Cukup Baik	<i>BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko terhadap seluruh risiko namun belum optimal, pada BPR dinilai cukup baik.</i>
8	BPR menerapkan tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi yang didukung dengan kebijakan atau prosedur yang diperlukan.	Cukup Baik	<i>Penilaian terhadap indikator BPR menerapkan tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi yang didukung dengan kebijakan atau prosedur yang diperlukan menunjukkan bahwa kondisi BPR adalah cukup baik; meskipun demikian, masih perlu perbaikan seperti penguatan</i>

			<i>implementasi kebijakan dan prosedur yang ada, serta peningkatan koordinasi antar unit untuk memastikan bahwa semua aspek tata kelola dan manajemen risiko dapat berjalan secara sinergis dan efektif.</i>
9	BPR menerapkan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme dalam melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Cukup Baik	<i>Penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme dalam melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan berjalan dengan cukup baik; meskipun demikian, masih perlu ditingkatkan seperti peningkatan kesadaran dan pelatihan bagi karyawan, serta penguatan mekanisme pemantauan dan evaluasi untuk memastikan bahwa program tersebut dapat diimplementasikan secara lebih efektif dan sesuai dengan perkembangan regulasi yang ada.</i>
10	BPR menerapkan strategi anti fraud secara efektif sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Kurang Baik	<i>penerapan strategi anti fraud secara efektif sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan berjalan dengan kurang baik, namun ada beberapa yang perlu diperbaiki, seperti penanganan kasus fraud, serta penguatan program pelatihan untuk karyawan agar lebih memahami dan mampu mengidentifikasi potensi risiko fraud, sehingga strategi yang diterapkan dapat lebih optimal dan responsif terhadap ancaman yang ada.</i>
11	BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.	Kurang Baik	<i>BPR belum menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh, dan saat ini dinilai kurang baik.</i>
12	BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Cukup Baik	<i>BPR belum sepenuhnya menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, namun dalam sebagian aktivitas operasional BPR manajemen risiko telah diterapkan, penilaian BPR berada dalam kondisi cukup baik.</i>

13	BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	Cukup Baik	<i>Dalam upaya pengembangannya, BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh namun masih perlu penyesuaian dengan kebutuhan manajemen, penilaian BPR cukup baik.</i>
14	Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia antara lain melalui pelatihan dan/ atau sosialisasi mengenai manajemen risiko.	Cukup Baik	<i>Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia antara lain melalui pelatihan dan/ atau sosialisasi mengenai manajemen risiko namun belum optimal, kondisi BPR ini dinilai cukup baik.</i>
C. Hasil Penerapan Tata Kelola			
15	BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta mampu memelihara dan memperbaiki profil risiko dalam rangka mendukung penerapan manajemen risiko yang lebih baik.	Cukup Baik	<i>BPR telah menyusun laporan profil risiko yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, namun dalam memelihara dan memperbaiki profil risiko dalam rangka mendukung penerapan manajemen risiko yang lebih baik masih belum dilakukan dengan optimal, penilaian BPR cukup baik.</i>
16	BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Baik	<i>BPR telah menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, pada BPR dinilai baik.</i>
17	BPR menyusun dan menyampaikan laporan penerapan strategi anti fraud secara rutin serta laporan kejadian fraud yang berdampak signifikan.	Baik	<i>BPR menyusun dan menyampaikan laporan penerapan strategi anti fraud secara rutin serta laporan kejadian fraud yang berdampak signifikan, pada BPR saat ini dinilai baik.</i>
Ringkasan Penilaian Struktur dan Infrastruktur			
Indikator dengan nilai Tidak Dinilai:		0 Indikator	
Indikator dengan nilai Telah Terpenuhi:		0 Indikator	
Indikator dengan nilai Sebagian Terpenuhi:		3 Indikator	
Indikator dengan nilai Belum Terpenuhi:		0 Indikator	
Kesimpulan Penilaian Struktur dan Infrastruktur:		Sebagian Terpenuhi	

Ringkasan Penilaian Proses dan Hasil	
Indikator dengan nilai Tidak Dinilai:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Sangat Baik:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Baik:	4 Indikator
Indikator dengan nilai Cukup Baik:	8 Indikator
Indikator dengan nilai Kurang Baik:	2 Indikator
Indikator dengan nilai Tidak Baik:	0 Indikator
Modus Nilai Indikator Proses dan Hasil:	Cukup Baik
Median Nilai Indikator Proses dan Hasil:	Cukup Baik
Rata-rata Nilai Indikator Proses dan Hasil:	Cukup Baik
Nilai Faktor yang Dipilih:	Nilai 4 Kurang Memadai
Kesimpulan Penilaian Faktor 9. Penerapan Manajemen Risiko dan Strategi Anti Fraud	
Nilai Faktor	
Nilai 4 Kurang Memadai	
Penjelasan Nilai Faktor	
<p>Apabila memenuhi kondisi belum sepenuhnya terpenuhi struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan kurang memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang kurang baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> BPR memenuhi sebagian persyaratan terkait dengan komite, satuan kerja, dan/atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko, termasuk fungsi anti fraud program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan serta penerapan fungsi manajemen risiko dilakukan dengan kurang baik sehingga: <ol style="list-style-type: none"> peringkat risiko tinggi; terdapat fraud; dan/atau peringkat program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme tinggi. BPR telah memiliki pedoman manajemen risiko, prosedur manajemen risiko, penetapan limit risiko, serta kebijakan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru dengan ruang lingkup kurang memadai, dan penerapan manajemen risiko kurang memperhatikan edoman dan kebijakan tersebut. Sebagian kecil pelaksanaan tugas dan fungsi Direksi dan Dewan Komisaris terhadap penerapan manajemen risiko dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan maupun pedoman, termasuk mengembangkan budaya manajemen risiko pada sebagian kecil jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia. 	
No	Analisa Faktor Positif dan Negatif
A. Struktur dan Infrastruktur	
1)	Faktor Positif

	<ol style="list-style-type: none"> 1. Indikator BPR memiliki komite, satuan kerja, dan/ atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko sesuai dengan permodalan, termasuk fungsi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme ssesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, pada BPR saat ini dinilai sebagian terpenuhi. 2. Indikator BPR memiliki dan menginginkan kebijakan manajemen risiko, prosedur manajemen risiko, dan penetapan limit risiko, indikator BPR memiliki dan menginginkan kebijakan manajemen risiko, prosedur manajemen risiko, dan penetapan limit risiko, yang dinilai sebagian terpenuhi 3. Hasil evaluasi menunjukkan indikator BPR memiliki dan menginginkan kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai dengan ketentuan yang berlaku, pada BPR berada dalam kondisi sebagian terpenuhi.
2)	Faktor Negatif
	PT BPR SINAR MAS PELITA mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.
B. Proses Penerapan Tata Kelola	
1)	Faktor Positif
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hasil evaluasi menunjukkan indikator Komite, satuan kerja, dan/ atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko sesuai dengan permodalan, termasuk fungsi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan kebijakan dan prosedur berdasarkan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, pada BPR berada dalam kondisi cukup baik. 2. Manajemen BPR telah menilai bahwa indikator Direksi: a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan manajemen risiko secara tertulis; b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi; c. melakukan kebijakan dan strategi manajemen risiko dengan baik; dan d. memastikan penerapan serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan strategi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme, berjalan dengan baik. 3. Berdasarkan hasil penilaian, indikator Dewan Komisaris: a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan manajemen risiko; b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko; c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris; d. melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko; dan e. memastikan penerapan serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan strategi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme, pada BPR dinilai baik. 4. Berdasarkan hasil penilaian, indikator BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko terhadap seluruh risiko, pada BPR dinilai cukup baik. 5. Penilaian terhadap indikator BPR menerapkan tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi yang didukung dengan kebijakan atau prosedur yang diperlukan, yang dimiliki BPR adalah cukup baik. 6. Manajemen BPR telah menilai bahwa indikator BPR menerapkan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme dalam melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, berjalan dengan cukup baik. 7. Hasil evaluasi menunjukkan indikator BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, pada BPR berada dalam kondisi cukup baik. 8. Dalam upaya pengembangannya, BPR memiliki indikator BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh, dengan pencapaian cukup baik. 9. Berdasarkan hasil penilaian, indikator Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko, pada BPR dinilai cukup baik.

2)	Faktor Negatif
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Manajemen BPR telah menilai bahwa indikator BPR menerapkan strategi anti fraud secara efektif sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, berjalan dengan kurang baik dikarenakan masih terdapat fraud. 2. Indikator BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh, pada BPR saat ini dinilai kurang baik.
C. Hasil Penerapan Tata Kelola	
1)	Faktor Positif
	<ol style="list-style-type: none"> 1. BPR memiliki indikator BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta mampu memelihara dan memperbaiki profil risiko dalam rangka mendukung penerapan manajemen risiko yang lebih baik, indikator BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta mampu memelihara dan memperbaiki profil risiko dalam rangka mendukung penerapan manajemen risiko yang lebih baik, yang dinilai cukup baik. 2. Berdasarkan hasil penilaian, indikator BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, pada BPR dinilai cukup baik. 3. Indikator BPR menyusun dan menyampaikan laporan penerapan strategi anti fraud secara rutin serta laporan kejadian fraud yang berdampak signifikan, pada BPR saat ini dinilai baik.
2)	Faktor Negatif
	PT BPR SINAR MAS PELITA mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.

Faktor 10. Batas Maksimum Pemberian Kredit

No	Kriteria / Indikator	Penilaian	Isian Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur			
1	BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/ atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	Sebagian Terpenuhi	<i>BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/ atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR sesuai dengan ketentuan yang berlaku namun belum dilakukan pengkinian atau kaji ulang., dengan penilaian sebagian terpenuhi.</i>
B. Proses Penerapan Tata Kelola			
2	BPR secara berkala mengevaluasi dan menginikasikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang- undangan.	Cukup Baik	<i>BPR secara berkala telah mengevaluasi kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan namun belum dilakukan pengkinian, penilaian berjalan dengan cukup baik.</i>
3	Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/ atau pemberian kredit besar telah memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai BMPK dan memperhatikan prinsip kehati- hatian maupun peraturan perundang-undangan.	Baik	<i>Berdasarkan hasil penilaian, BPR memperlihatkan indikator Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/ atau pemberian kredit besar telah memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai BMPK dan memperhatikan prinsip kehati- hatian maupun peraturan perundang- undangan, dengan penilaian baik.</i>
C. Hasil Penerapan Tata Kelola			
4	Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Baik	<i>BPR telah menyampaikan laporan pemberian kredit kepada pihak terkait dan tidak ada pemberian yang melanggar dan/atau melampaui BMPK serta laporan tersebut telah disampaikan secara berkala kepada OJK secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan, yang dinilai baik.</i>
5	BPR tidak melanggar dan/ atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Sangat Baik	<i>BPR tidak melanggar dan/ atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, berjalan dengan sangat baik.</i>

Ringkasan Penilaian Struktur dan Infrastruktur	
Indikator dengan nilai Tidak Dinilai:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Telah Terpenuhi:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Sebagian Terpenuhi:	1 Indikator
Indikator dengan nilai Belum Terpenuhi:	0 Indikator
Kesimpulan Penilaian Struktur dan Infrastruktur:	Terpenuhi Sebagian
Ringkasan Penilaian Proses dan Hasil	
Indikator dengan nilai Tidak Dinilai:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Sangat Baik:	1 Indikator
Indikator dengan nilai Baik:	2 Indikator
Indikator dengan nilai Cukup Baik:	1 Indikator
Indikator dengan nilai Kurang Baik:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Tidak Baik:	0 Indikator
Modus Nilai Indikator Proses dan Hasil:	Baik
Median Nilai Indikator Proses dan Hasil:	Baik
Rata-rata Nilai Indikator Proses dan Hasil:	Baik
Nilai Faktor yang Dipilih:	Nilai 2 Memadai
Kesimpulan Penilaian Faktor 10. Batas Maksimum Pemberian Kredit	
Nilai Faktor	
Nilai 2 Memadai	
Penjelasan Nilai Faktor	
<p>Apabila memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> BPR telah memiliki, mengevaluasi, dan menginikasikan kebijakan, sistem dan prosedur tertulis terkait BMPK dengan ruang lingkup memadai, serta melaksanakan kebijakan, sistem dan prosedur, termasuk sosialisasi kebijakan BMPK kepada seluruh sumber daya manusia BPR. Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar sebagian besar telah memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan, termasuk melakukan pemantauan terhadap proses pemberian kredit sehingga penyelesaian pelanggaran dan/atau pelanggaran BMPK dilakukan dengan segera. Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan 	
No	Analisa Faktor Positif dan Negatif
A. Struktur dan Infrastruktur	
1)	Faktor Positif

	1. BPR telah mengimplementasikan indikator BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dengan penilaian sebagian terpenuhi.
2)	Faktor Negatif
	PT BPR SINAR MAS PELITA mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.
B. Proses Penerapan Tata Kelola	
1)	Faktor Positif
	1. Manajemen BPR telah menilai bahwa indikator BPR secara berkala mengevaluasi dan menginikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan, berjalan dengan cukup baik. 2. Berdasarkan hasil penilaian, BPR memperlihatkan indikator Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan, dengan penilaian baik.
2)	Faktor Negatif
	PT BPR SINAR MAS PELITA mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.
C. Hasil Penerapan Tata Kelola	
1)	Faktor Positif
	1. BPR memiliki indikator Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/ atau pemberian kredit yang melanggar dan/ atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, indikator Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/ atau pemberian kredit yang melanggar dan/ atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, yang dinilai baik. 2. 1. Manajemen BPR telah menilai bahwa indikator BPR tidak melanggar dan/ atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, berjalan dengan sangat baik.
2)	Faktor Negatif
	1. PT BPR SINAR MAS PELITA mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.

Faktor 11. Integritas Pelaporan dan Sistem Teknologi Informasi

No	Kriteria / Indikator	Penilaian	Isian Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur			
1	Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan nonkeuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.	Sebagian Terpenuhi	<i>BPR memperlihatkan indikator Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan nonkeuangan namun sistem informasi manajemen yang memadai masih terbatas, termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu, dengan penilaian telah terpenuhi sebagian.</i>
2	BPR memastikan ketersediaan dan kecukupan pelaporan internal yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai dalam rangka meningkatkan kualitas proses pengambilan keputusan oleh Direksi dan kualitas proses pengawasan oleh Dewan Komisaris.	Sebagian Terpenuhi	<i>BPR belum sepenuhnya memastikan ketersediaan dan kecukupan pelaporan internal yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai dalam rangka meningkatkan kualitas proses pengambilan keputusan oleh Direksi dan kualitas proses pengawasan oleh Dewan Komisaris, dinilai telah terpenuhi sebagian.</i>
3	BPR telah memiliki kebijakan dan prosedur terkait integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi.	Telah Terpenuhi	<i>BPR memperlihatkan indikator BPR telah memiliki kebijakan dan prosedur terkait integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi, dengan penilaian telah terpenuhi.</i>
B. Proses Penerapan Tata Kelola			
4	BPR memperhatikan prinsip penerapan tata kelola dan manajemen risiko dalam rangka penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi.	Cukup Baik	<i>BPR memperhatikan prinsip penerapan tata kelola dan manajemen risiko dalam rangka penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi, pada BPR indikator ini dinilai cukup baik mengingat masih ada beberapa aspek yang dapat ditingkatkan, seperti penguatan kebijakan keamanan siber, serta evaluasi berkala terhadap sistem TI.</i>

5	BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Baik	<i>BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, yang dimiliki BPR dinilai baik.</i>
6	BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan transparansi penerapan tata kelola, laporan keuangan tahunan BPR sesuai dengan standar akuntansi keuangan, laporan akuntan publik, opini akuntan publik, seluruh aspek transparansi dan informasi, serta surat pernyataan kebenaran data dan/ atau informasi laporan keuangan tahunan, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Baik	<i>BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan transparansi penerapan tata kelola, laporan keuangan tahunan BPR sesuai dengan standar akuntansi keuangan, laporan akuntan publik, opini akuntan publik, seluruh aspek transparansi dan informasi, serta surat pernyataan kebenaran data dan/ atau informasi laporan keuangan tahunan, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, di BPR menunjukkan kondisi baik.</i>
7	BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/ atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Cukup Baik	<i>BPR belum sepenuhnya melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/ atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, terbukti dengan belum dikinikannya ketentuan terkait transparansi produk, pada BPR berada dalam kondisi cukup baik.</i>
8	BPR menyusun dan menyajikan laporan/ informasi dengan tata cara, jenis, dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Baik	<i>BPR menyusun dan menyajikan laporan/ informasi dengan tata cara, jenis, dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, dengan pencapaian baik.</i>
9	Seluruh laporan yang disampaikan telah sesuai dengan kondisi sebenarnya, antara lain tidak terjadinya window dressing, kesalahan penetapan kualitas kredit, kesalahan perhitungan PPKA/CKPN maupun pencatatan yang tidak sesuai SAK yang dilakukan secara dengan sengaja.	Baik	<i>Implementasi indikator Seluruh laporan yang disampaikan telah sesuai dengan kondisi sebenarnya, antara lain tidak terjadinya window dressing, kesalahan penetapan kualitas kredit, kesalahan perhitungan PPKA/CKPN maupun pencatatan yang tidak sesuai SAK yang dilakukan secara dengan sengaja, di BPR menunjukkan kondisi baik.</i>
C. Hasil Penerapan Tata Kelola			

10	Tidak terdapat penyalahgunaan dan pemanfaatan terkait rekayasa keuangan dan/ atau rekayasa hukum, untuk kepentingan BPR dan/ atau pihak lain baik internal maupun eksternal BPR yang tidak sesuai dengan prinsip pengelolaan perbankan yang sehat.	Baik	<i>Tidak terdapat penyalahgunaan dan pemanfaatan terkait rekayasa keuangan dan/ atau rekayasa hukum, untuk kepentingan BPR dan/ atau pihak lain baik internal maupun eksternal BPR yang tidak sesuai dengan prinsip pengelolaan perbankan yang sehat, di BPR menunjukkan kondisi baik.</i>
11	Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/ atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Baik	<i>BPR memiliki indikator Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/ atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, dengan pencapaian baik.</i>
12	Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan serta tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu.	Baik	<i>Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan serta tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu, di BPR menunjukkan kondisi baik.</i>

Ringkasan Penilaian Struktur dan Infrastruktur

Indikator dengan nilai Tidak Dinilai:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Telah Terpenuhi:	1 Indikator
Indikator dengan nilai Sebagian Terpenuhi:	2 Indikator
Indikator dengan nilai Belum Terpenuhi:	0 Indikator
Kesimpulan Penilaian Struktur dan Infrastruktur:	Terpenuhi sebagian

Ringkasan Penilaian Proses dan Hasil

Indikator dengan nilai Tidak Dinilai:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Sangat Baik:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Baik:	7 Indikator
Indikator dengan nilai Cukup Baik:	2 Indikator
Indikator dengan nilai Kurang Baik:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Tidak Baik:	0 Indikator
Modus Nilai Indikator Proses dan Hasil:	Baik
Median Nilai Indikator Proses dan Hasil:	Baik
Rata-rata Nilai Indikator Proses dan Hasil:	Baik

Nilai Faktor yang Dipilih:		Nilai 3 Cukup Memadai
Kesimpulan Penilaian Faktor 11. Integritas Pelaporan dan Sistem Teknologi Informasi		
Nilai Faktor		
Nilai 3 Cukup Memadai		
Penjelasan Nilai Faktor		
<p>Apabila memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan cukup memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang cukup baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> BPR memiliki sistem pelaporan keuangan dan nonkeuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang cukup memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten sehingga penyusunan laporan dilakukan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu. BPR belum sepenuhnya memiliki pelaporan internal yang didukung oleh sistem informasi manajemen dan belum dapat meningkatkan kualitas proses pengambilan keputusan oleh Direksi dan kualitas proses pengawasan oleh Dewan Komisaris, walaupun tidak terdapat penyalahgunaan dan pemanfaatan dalam rangka rekayasa keuangan dan/atau rekayasa hukum. BPR telah memiliki kebijakan dan prosedur terkait integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi dengan ruang lingkup cukup memadai, sehingga penyampaian pelaporan dilakukan cukup sesuai dengan kebijakan dan prosedur. BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan meskipun terdapat laporan pengaduan dari nasabah yang bersifat cukup signifikan dan dapat ditindaklanjuti 		
No	Analisa Faktor Positif dan Negatif	
A. Struktur dan Infrastruktur		
1)	Faktor Positif	
	<ol style="list-style-type: none"> Berdasarkan hasil penilaian, BPR memperlihatkan indikator Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan nonkeuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu, dengan penilaian telah terpenuhi sebagian. Indikator BPR memastikan ketersediaan dan kecukupan pelaporan internal yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai dalam rangka meningkatkan kualitas proses pengambilan keputusan oleh Direksi dan kualitas proses pengawasan oleh Dewan Komisaris, pada BPR indikator BPR memastikan ketersediaan dan kecukupan pelaporan internal yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai dalam rangka meningkatkan kualitas proses pengambilan keputusan oleh Direksi dan kualitas proses pengawasan oleh Dewan Komisaris, dinilai telah terpenuhi sebagian. Berdasarkan hasil penilaian, BPR memperlihatkan indikator BPR telah memiliki kebijakan dan prosedur terkait integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi, dengan penilaian telah terpenuhi. 	
2)	Faktor Negatif	
	PT BPR SINAR MAS PELITA mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.	
B. Proses Penerapan Tata Kelola		
1)	Faktor Positif	

	<ol style="list-style-type: none"> 1. Indikator BPR memperhatikan prinsip penerapan tata kelola dan manajemen risiko dalam rangka penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi, pada BPR indikator BPR memperhatikan prinsip penerapan tata kelola dan manajemen risiko dalam rangka penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi, dinilai cukup baik. 2. Ditinjau dari sisi regulasi, indikator BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, yang dimiliki BPR dinilai baik. 3. Implementasi indikator BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan transparansi penerapan tata kelola, laporan keuangan tahunan BPR sesuai dengan standar akuntansi keuangan, laporan akuntan publik, opini akuntan publik, seluruh aspek transparansi dan informasi, serta surat pernyataan kebenaran data dan/ atau informasi laporan keuangan tahunan, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, di BPR menunjukkan kondisi baik. 4. Hasil evaluasi menunjukkan indikator BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/ atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, pada BPR berada dalam kondisi cukup baik. 5. Dalam upaya pengembangannya, BPR memiliki indikator BPR menyusun dan menyajikan laporan/ informasi dengan tata cara, jenis, dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, dengan pencapaian baik. 6. Implementasi indikator Seluruh laporan yang disampaikan telah sesuai dengan kondisi sebenarnya, antara lain tidak terjadinya window dressing, kesalahan penetapan kualitas kredit, kesalahan perhitungan PPKA/CKPN maupun pencatatan yang tidak sesuai SAK yang dilakukan secara dengan sengaja, di BPR menunjukkan kondisi baik.
2)	Faktor Negatif
	PT BPR SINAR MAS PELITA mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.
C. Hasil Penerapan Tata Kelola	
1)	Faktor Positif
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Implementasi indikator Tidak terdapat penyalahgunaan dan pemanfaatan terkait rekayasa keuangan dan/atau rekayasa hukum, untuk kepentingan BPR dan/atau pihak lain baik internal maupun eksternal BPR yang tidak sesuai dengan prinsip pengelolaan perbankan yang sehat, di BPR menunjukkan kondisi baik. 2. Dalam upaya pengembangannya, BPR memiliki indikator Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/ atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, dengan pencapaian baik. 3. Implementasi indikator Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan serta tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu, di BPR menunjukkan kondisi baik.
2)	Faktor Negatif
	PT BPR SINAR MAS PELITA mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.

Faktor 12. Rencana Bisnis BPR

No	Kriteria / Indikator	Penilaian	Isian Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur			
1	Rencana bisnis BPR termasuk rencana aksi keuangan berkelanjutan telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR.	Telah Terpenuhi	Hasil penilaian menunjukkan bahwa indikator Rencana bisnis BPR termasuk rencana aksi keuangan berkelanjutan telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris namun belum sesuai dengan visi dan misi BPR secara terperinci hanya tertuang secara umum, BPR tergolong telah terpenuhi.
2	Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penguatan permodalan, rencana penanganan permasalahan keuangan BPR yang memengaruhi keberlangsungan usaha BPR dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Sebagian Terpenuhi	BPR belum sepenuhnya menggambarkan rencana strategis jangka panjang hanya rencana bisnis tahunan dan rencana penanganan permasalahan keuangan BPR yang memengaruhi keberlangsungan usaha BPR dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan belum dituangkan secara menyeluruh, pada BPR dinilai terpenuhi sebagian.
3	Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.	Telah Terpenuhi	BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur, di BPR menunjukkan kondisi telah terpenuhi.
B. Proses Penerapan Tata Kelola			
4	Rencana bisnis BPR disusun secara realistis, komprehensif dan terukur (achievable) dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor eksternal dan internal yang dapat memengaruhi kelangsungan usaha BPR; b. asas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan c. penerapan manajemen risiko.	Cukup Baik	Rencana bisnis BPR disusun secara realistis, komprehensif dan terukur (achievable) dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor eksternal dan internal yang dapat memengaruhi kelangsungan usaha BPR; b. asas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; namun belum menggambarkan penerapan manajemen risiko, di BPR menunjukkan kondisi cukup baik
5	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR.	Baik	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR terbukti dari Laporan Dewan Komisaris, pada BPR dinilai baik.

C. Hasil Penerapan Tata Kelola			
6	Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Baik	<i>Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, pada BPR dinilai baik.</i>
7	Indikator kinerja keuangan dan nonkeuangan dalam rencana bisnis tercapai sesuai target yang ditetapkan, termasuk realisasi atas komitmen pemegang saham.	Baik	<i>BPR memiliki Indikator kinerja keuangan dan nonkeuangan dalam rencana bisnis tercapai sesuai target yang ditetapkan, termasuk realisasi atas komitmen pemegang saham, dengan pencapaian baik.</i>
Ringkasan Penilaian Struktur dan Infrastruktur			
Indikator dengan nilai Tidak Dinilai:		0 Indikator	
Indikator dengan nilai Telah Terpenuhi:		2 Indikator	
Indikator dengan nilai Sebagian Terpenuhi:		1 Indikator	
Indikator dengan nilai Belum Terpenuhi:		0 Indikator	
Kesimpulan Penilaian Struktur dan Infrastruktur:		Terpenuhi Secara Keseluruhan	
Ringkasan Penilaian Proses dan Hasil			
Indikator dengan nilai Tidak Dinilai:		0 Indikator	
Indikator dengan nilai Sangat Baik:		0 Indikator	
Indikator dengan nilai Baik:		3 Indikator	
Indikator dengan nilai Cukup Baik:		1 Indikator	
Indikator dengan nilai Kurang Baik:		0 Indikator	
Indikator dengan nilai Tidak Baik:		0 Indikator	
Modus Nilai Indikator Proses dan Hasil:		Baik	
Median Nilai Indikator Proses dan Hasil:		Baik	
Rata-rata Nilai Indikator Proses dan Hasil:		Baik	
Nilai Faktor yang Dipilih:		Nilai 2 (Memadai)	

Kesimpulan Penilaian Faktor 12. Rencana Bisnis BPR	
Nilai Faktor	
Nilai 2 (Memadai)	
Penjelasan Nilai Faktor	
<p>Memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/ atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain:</p> <p>a. Rencana bisnis BPR telah disusun secara realistis, komprehensif, dan terukur (achievable) oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR, serta menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan dan direalisasikan sesuai dengan perencanaan sehingga indikator kinerja keuangan dan nonkeuangan dalam rencana bisnis tercapai sesuai target yang ditetapkan, termasuk penyampaian laporan rencana bisnis secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.</p> <p>b. Rencana bisnis BPR yang telah disusun didukung oleh pemegang saham yang ditunjukkan dengan pemenuhan sebagian besar komitmen dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur.</p>	
No	Analisa Faktor Positif dan Negatif
A. Struktur dan Infrastruktur	
1)	Faktor Positif
	<ol style="list-style-type: none"> Hasil penilaian menunjukkan bahwa indikator Rencana bisnis BPR termasuk rencana aksi keuangan berkelanjutan telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR, BPR tergolong telah terpenuhi. Berdasarkan hasil penilaian, indikator Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penguatan permodalan, rencana penanganan permasalahan keuangan BPR yang memengaruhi keberlangsungan usaha BPR dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, pada BPR dinilai terpenuhi sebagian. Implementasi indikator Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur, di BPR menunjukkan kondisi telah terpenuhi.
2)	Faktor Negatif
	PT BPR SINAR MAS PELITA mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.
B. Proses Penerapan Tata Kelola	
1)	Faktor Positif
	<ol style="list-style-type: none"> Implementasi indikator Rencana bisnis BPR disusun secara realistis, komprehensif dan terukur (achievable) dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor eksternal dan internal yang dapat memengaruhi kelangsungan usaha BPR; b. asas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan c. penerapan manajemen risiko, di BPR menunjukkan kondisi cukup baik. Berdasarkan hasil penilaian, indikator Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR, pada BPR dinilai baik.
2)	Faktor Negatif
	PT BPR SINAR MAS PELITA mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.
C. Hasil Penerapan Tata Kelola	

1)	Faktor Positif
	<ol style="list-style-type: none">1. Indikator Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, pada BPR indikator Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, dinilai baik.2. Dalam upaya pengembangannya, BPR memiliki indikator Indikator kinerja keuangan dan nonkeuangan dalam rencana bisnis tercapai sesuai target yang ditetapkan, termasuk realisasi atas komitmen pemegang saham, dengan pencapaian baik.
2)	Faktor Negatif
	PT BPR SINAR MAS PELITA mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.

KESIMPULAN UMUM HASIL PENILAIAN PELAKSANAAN TATA KELOLA TAHUN 2024

Nama BPR : PT BPR SINAR MAS PELITA
Alamat : JL Raya Padalarang No 36 Kab, Bandung Barat
Nomor Telepon : 022-6809417
Posisi Laporan : Tahun 2024
Modal Inti : Rp 73.485.148.749,-
Total Aset : Rp 369.345.362.876,-

No	Kriteria / Indikator	Nilai Faktor
1	Aspek Pemegang Saham	Nilai 3 Cukup Memadai
2	Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Direksi	Nilai 3 Cukup Memadai
3	Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Dewan Komisaris	Nilai 3 Cukup Memadai
4	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite	<i>Tidak Dinilai</i>
5	Penanganan Benturan Kepentingan	Nilai 3 Cukup Memadai
6	Penerapan Fungsi Kepatuhan	Nilai 3 Cukup Memadai
7	Penerapan Fungsi Audit Intern	Nilai 2 Memadai
8	Penerapan Fungsi Audit Ekstern	Nilai 1 Sangat Memadai
9	Penerapan Manajemen Risiko dan Strategi Anti Fraud	Nilai 4 Kurang Memadai
10	Batas Maksimum Pemberian Kredit	Nilai 2 Memadai
11	Integritas Pelaporan dan Sistem Teknologi Informasi	Nilai 3 Cukup Memadai
12	Rencana Bisnis BPR	Nilai 2 Memadai
	Modus Nilai Faktor	Nilai 3
	Median Nilai Faktor	Nilai 3
	Rata-rata Nilai Faktor	Nilai 2.42
	Peringkat Komposit	3
	Predikat Komposit	Cukup Baik

Kesimpulan

Manajemen BPR telah melakukan pelaksanaan tata kelola yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip tata kelola. Dalam hal terdapat kelemahan pelaksanaan prinsip tata kelola, secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen BPR.



Faktor Positif

A. Faktor Positif Struktur dan Infrastruktur

1. Manajemen BPR telah menilai bahwa indikator Komposisi dan persyaratan pemegang saham memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, berjalan dengan telah terpenuhi.
2. Direksi memenuhi seluruh persyaratan yang harus dipenuhi selama menjabat sesuai dengan ketentuan sehingga tugas dan tanggung jawab terlaksana dengan cukup baik namun terdapat kelemahan dalam tugas dan tanggung jawab dan dapat diperbaiki serta hasil kinerja Direksi dapat dipertanggungjawabkan kepada pemegang saham melalui RUPS.
3. Anggota Dewan Komisaris memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian agar dapat mengimplementasikan kompetensi yang dimiliki dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan BPR, pada BPR berada dalam kondisi telah terpenuhi.
4. Implementasi indikator BPR memiliki kebijakan benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR, termasuk pengungkapan benturan kepentingan, penanganan benturan kepentingan, administrasi, dan dokumentasi namun kebijakan tersebut masih terlalu sederhana dan perlu dikaji ulang sesuai dengan ketentuan terkini, di BPR menunjukkan kondisi sebagian terpenuhi
5. BPR memperlihatkan indikator Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan telah menyusun dan/ atau menginikan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan, dengan penilaian telah terpenuhi.
6. BPR memiliki indikator BPR memiliki satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern sesuai permodalan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, indikator BPR memiliki satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern sesuai permodalan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, yang dinilai telah terpenuhi.
7. Manajemen BPR telah menilai bahwa indikator Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) telah memenuhi aspek- aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, target waktu penyelesaian audit, komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP, dan mempertimbangkan kompetensi dari KAP (termasuk Akuntan Publik) yang memadai, berjalan dengan telah terpenuhi.
8. BPR memiliki dan menginikan kebijakan manajemen risiko, prosedur manajemen risiko, dan penetapan limit risiko, indikator BPR memiliki dan menginikan kebijakan manajemen risiko, prosedur manajemen risiko, dan penetapan limit risiko, yang dinilai sebagian terpenuhi
9. BPR telah mengimplementasikan indikator BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dengan penilaian sebagian terpenuhi.
10. BPR memperlihatkan indikator BPR telah memiliki kebijakan dan prosedur terkait integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi, dengan penilaian telah terpenuhi.
11. Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur, di BPR menunjukkan kondisi telah terpenuhi.



B. Faktor Positif Proses Penerapan Tata Kelola

1. Implementasi proses penerapan tata kelola Aspek Pemegang Saham di BPR menunjukkan kondisi memadai.
2. Berdasarkan hasil penilaian, BPR memperlihatkan proses penerapan tata kelola Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Direksi dengan penilaian memadai.
3. Dalam upaya pengembangannya, BPR memiliki proses penerapan tata kelola Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Dewan Komisaris dengan pencapaian memadai.
4. Proses penerapan tata kelola Penanganan Benturan Kepentingan pada BPR proses penerapan tata kelola Penanganan Benturan Kepentingan dinilai memadai.
5. Proses penerapan tata kelola Penerapan Fungsi Kepatuhan pada BPR proses penerapan tata kelola Penerapan Fungsi Kepatuhan dinilai memadai.
6. Hasil evaluasi menunjukkan proses penerapan tata kelola Penerapan Fungsi Audit Intern pada BPR berada dalam kondisi memadai.
7. Berdasarkan hasil penilaian, BPR memperlihatkan proses penerapan tata kelola Penerapan Fungsi Audit Ekstern dengan penilaian memadai.
8. Proses penerapan tata kelola Penerapan Manajemen Risiko dan Strategi Anti Fraud pada BPR proses penerapan tata kelola Penerapan Manajemen Risiko dan Strategi Anti Fraud dinilai memadai.
9. BPR telah mengimplementasikan proses penerapan tata kelola Batas Maksimum Pemberian Kredit dengan penilaian memadai.
10. Manajemen BPR telah menilai bahwa proses penerapan tata kelola Integritas Pelaporan dan Sistem Teknologi Informasi berjalan dengan memadai.
11. Hasil evaluasi menunjukkan proses penerapan tata kelola Rencana Bisnis BPR pada BPR berada dalam kondisi memadai.

C. Faktor Positif Hasil Penerapan Tata Kelola

1. Manajemen BPR telah menilai bahwa hasil penerapan tata kelola Aspek Pemegang Saham berjalan dengan memadai.
2. Berdasarkan hasil penilaian, BPR memperlihatkan hasil penerapan tata kelola Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Direksi dengan penilaian memadai.
3. Hasil evaluasi menunjukkan hasil penerapan tata kelola Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Dewan Komisaris pada BPR berada dalam kondisi memadai.
4. Hasil penerapan tata kelola Penanganan Benturan Kepentingan pada BPR saat ini dinilai memadai.
5. Implementasi hasil penerapan tata kelola Penerapan Fungsi Kepatuhan di BPR menunjukkan kondisi cukup memadai.
6. Dalam upaya pengembangannya, BPR memiliki hasil penerapan tata kelola Penerapan Fungsi Audit Intern dengan pencapaian cukup memadai.
7. BPR memiliki hasil penerapan tata kelola Penerapan Fungsi Audit Ekstern hasil penerapan tata kelola Penerapan Fungsi Audit Ekstern yang dinilai memadai.
8. Hasil penerapan tata kelola Penerapan Manajemen Risiko dan Strategi Anti Fraud pada BPR saat ini dinilai memadai.
9. Berdasarkan hasil penilaian, BPR memperlihatkan hasil penerapan tata kelola Integritas Pelaporan dan Sistem Teknologi Informasi dengan penilaian cukup memadai.
10. Hasil penerapan tata kelola Rencana Bisnis BPR pada BPR hasil penerapan tata kelola Rencana Bisnis BPR dinilai memadai.



PT BPR SINAR MAS PELITA

PT BPR SINAR MAS PELITA
Jl. Raya Padalarang No 36, Kabupaten Bandung Barat
Telepon: 022-6809417
Email: bprsinarmaspelita1@gmail.com

Faktor Negatif
A. Faktor Negatif Struktur dan Infrastruktur
1. Struktur dan infrastruktur Penerapan Fungsi Kepatuhan pada BPR saat ini dinilai masih terpenuhi sebagian dikarenakan terdapat kekosongan pada posisi pejabat eksekutif. 2. BPR belum sepenuhnya dapat menerapkan strategi anti fraud secara efektif sehubungan dengan masih terdapatnya kasus fraud di BPR. 3. BPR belum menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.
B. Faktor Negatif Proses Penerapan Tata Kelola
Nihil
C. Faktor Negatif Hasil Penerapan Tata Kelola
Nihil

Berdasarkan analisis terhadap seluruh kriteria atau indikator penilaian Penerapan Tata Kelola, disimpulkan bahwa Laporan Tata Kelola sudah di sesuaikan dengan ketentuan yang berlaku dengan nilai komposit cukup baik.

Bandung Barat, 30 Januari 2025

PT BPR Sinar Mas Pelita

Julia Intan Sitorus, SH.
Komisaris Utama



PT. BPR SINAR MAS PELITA

Taufiq Nugraha, SE.
Direktur Utama

LAPORAN TRANSPARANSI
PELAKSANAAN TATA KELOLA

PT. BPR SINAR MAS PELITA
TAHUN 2024



Jl. Raya Padalarang No.36, Kertamulya, Kec. Padalarang,
Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat 40553
TELEPON: 022-6809417



1. Penjelasan Umum Penerapan Tata Kelola

Informasi Umum BPR	
Nama BPR/BPRS	BPR Sinar Mas Pelita
Alamat	Jl. Raya Padalarang No 36, Kab. Bandung Barat
Nomor Telepon	(022) 6809417

Penjelasan Umum:

Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG - Good Corporate Governance) di PT BPR Sinar Mas Pelita pada tahun 2024 telah membawa perkembangan yang positif dengan meningkatnya kinerja BPR meskipun menghadapi tantangan yang tidak ringan di sepanjang tahun 2024 di tengah kondisi perekonomian dan sektor usaha yang sebelumnya pulih.

BPR Sinar Mas Pelita memiliki komitmen yang kuat untuk melaksanakan Tata Kelola sesuai standar Tata Kelola yang telah diatur oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan) sehingga BPR Sinar Mas Pelita dapat terus tumbuh secara berkelanjutan dan memiliki daya saing di industri perbankan khususnya di wilayah Jawa Barat.

BPR Sinar Mas Pelita telah beroperasi lebih dari 30 tahun dan senantiasa menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola dalam setiap kegiatan usahanya. Prinsip-prinsip Tata Kelola yang dimaksud adalah Transparansi, Akuntabilitas, Tanggung Jawab, Independensi dan Kesetaraan. Hal ini di dorong oleh komitmen Bank untuk mencapai Visi, yaitu menjadi penyedia layanan perbankan yang terpercaya dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dengan dukungan SDM yang kompeten untuk menciptakan nilai tambah bagi para nasabah.

Dalam penerapan Tata Kelola, BPR Sinar Mas Pelita mengacu pada 3 (tiga) aspek Tata Kelola yaitu Struktur & Infrastruktur, Proses dan Hasil Tata Kelola. Ketiga aspek Tata Kelola tersebut menjadi intisari sekaligus fokus Bank dalam mewujudkan Tata Kelola yang bertujuan untuk melindungi kepentingan Pemangku Kepentingan.

Di sepanjang 2024 dan untuk di tahun mendatang, BPR Sinar Mas Pelita terus berupaya untuk mewujudkan hal-hal tersebut melalui penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik (GCG) secara konsisten dan berkelanjutan.

Ringkasan Hasil Penilaian Sendiri atas Penerapan Tata Kelola

Peringkat Komposit Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Tata Kelola	3. Cukup Baik
--	---------------

Penjelasan Peringkat Komposit Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Tata Kelola:

Manajemen BPR telah melakukan pelaksanaan tata kelola yang secara umum cukup baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip tata kelola. Dalam hal terdapat kelemahan pelaksanaan prinsip tata kelola, secara umum kelemahan tersebut cukup signifikan dan memerlukan perhatian khusus dari manajemen BPR.

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

1.	Nama	Taufiq Nugraha
	Penjelasan Tugas dan Tanggung Jawab:	
	Tugas dan Tanggung jawab DIREKTUR UTAMA, adalah sebagai berikut:	
	1. Mengembangkan visi, misi dan nilai-nilai dasar Perusahaan serta rencana strategis	



- Perusahaan yang dikonsolidasikan dalam anggaran bisnis;
2. Membangun struktur organisasi yang kuat dan dengan jelas menentukan fungsi- fungsi dari setiap unit kerja dan mengelola sumber daya manusia secara efektif;
 3. Membentuk suatu sistem bagi mekanisme kontrol internal dan manajemen risiko yang memastikan implementasi fungsi audit internal di seluruh jajaran manajemen, yang konsisten dengan kebijakan dan prosedur yang telah disetujui;
 4. Mengelola kepentingan para pemangku kepentingan Perusahaan;
 5. Bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan BPR;
 6. Mengelola BPR sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BPR dan peraturan perundang- undangan;
 7. Menerapkan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi;
 8. Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya; dan
 9. Menerapkan Tata Kelola yang Baik pada BPR, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi

2.	Nama	Yayu Septiawati
----	------	-----------------

Penjelasan Tugas dan Tanggung Jawab:

Tugas dan Tanggung jawab DIREKTUR BISNIS adalah sebagai berikut:

1. Menyusun rencana anggaran tahunan untuk bisnis BPR yang meliputi segmen produk BPR baik dalam penghimpunan dana maupun penyaluran dana;
2. Merumuskan strategi dan rencana kerja pemasaran untuk memastikan pencapaian target bisnis BPR tahunan yang sudah ditentukan;
3. Bekerja sama dengan Divisi Manajemen Risiko dalam mengelola tingkat risiko setiap segmen produk BPR untuk mendukung pencapaian target profitabilitas Perusahaan yang sudah ditetapkan, dan
4. Mempertanggungjawabkan dan memberikan laporan mengenai hasil kerja kepada Direktur Utama.
5. Menjaga dan mengelola kualitas kredit agar tidak menimbulkan risiko yang signifikan terhadap kelangsungan usaha BPR.

3.	Nama	Derry Panahatan Sitorus
----	------	-------------------------

Penjelasan Tugas dan Tanggung Jawab:

Tugas dan Tanggung jawab DIREKTUR OPERASIONAL adalah sebagai berikut:

1. Memastikan penyelarasan fungsi- fungsi dalam organisasi agar operasional Perusahaan berjalan dengan baik dan mematuhi kebijaksanaan internal yang telah ditetapkan;
2. Bertanggung jawab dalam mengembangkan jaringan distribusi Perusahaan, memantau kinerja jaringan;
3. Menerima laporan langsung dari Manajer Operasional .
4. Mengkoordinir kegiatan antar bagian seksi unit operasional Bank.
5. Melakukan pengawasan terhadap tugas dalam kantor.
6. Menindaklanjuti hasil temuan audit intern dan audit ekstern.
7. Mengganti atau mengambil alih tugas dan wewenang Direktur Utama apabila berhalangan tetap.
8. Menjaga kualitas dan kuantitas SDM agar sesuai dengan ketentuan dan berjalan secara efektif.
9. Mempertanggungjawabkan dan memberikan laporan mengenai hasil kerja kepada Direktur Utama.

4.	Nama	Siti Rijah
----	------	------------



Penjelasan Tugas dan Tanggung Jawab:

Tugas dan Tanggung jawab DIREKTUR KEPATUHAN adalah sebagai berikut:

1. Pengawasan manajemen risiko di seluruh Perusahaan, yang meliputi risiko-risiko dari sisi Kredit, Operasional, Kepatuhan, Likuiditas, Strategi/ Bisnis dan Reputasi serta risiko lain apabila ada;
2. Implementasi dan pemantauan kebijakan dan prosedur manajemen risiko;
3. Mengarahkan dan mengawasi seluruh kegiatan keuangan Perusahaan, termasuk penyajian laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan serta peraturan yang diterapkan;
4. Memastikan penerapan prosedur kepatuhan pada setiap unit kerja BPR.
5. Menetapkan langkah- langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang- undangan lain dalam rangka pelaksanaan prinsip kehati-hatian termasuk memberikan pendapat yang berbeda, apabila terdapat kebijakan dan/ atau keputusan yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan lain;
6. Memantau dan menjaga agar kegiatan usaha BPR tidak menyimpang dari peraturan perundang-undangan;
7. Memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lain;
8. Memastikan terlaksananya sosialisasi dan pelatihan berkelanjutan kepada seluruh unit kerja terkait mengenai peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkini dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan;
9. Melaporkan kepada anggota Direksi lainnya dan Dewan Komisaris secara tertulis terkait pelanggaran kepatuhan yang dilakukan oleh pegawai BPR;
10. Melapor kepada Dewan Komisaris secara tertulis terkait pelanggaran kepatuhan yang dilakukan oleh Direksi BPR;
11. Merumuskan strategi untuk mendukung terciptanya budaya kepatuhan; dan
12. Mempertanggungjawabkan dan memberikan laporan mengenai hasil kerja kepada Direktur Utama.

Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris:

1. Direksi sudah melakukan evaluasi dan melakukan pergantian Pimpinan Cabang Cimahi.
2. Direksi masih melakukan proses rekrutmen terkait calon Head Collector namun sampai Desember 2024 masih belum mendapatkan kandidat yang sesuai dengan kualifikasi.
3. Direktur Bisnis sudah melakukan upaya evaluasi Seluruh Pimpinan Cabang secara bulanan, baik dilakukan secara meeting langsung maupun lewat virtual zoom.
4. Direksi sudah melakukan langkah kajian terlebih dahulu terhadap pihak instansi atau lembaga yang akan diajak bekerjasama sebelum melakukan MOU, baik melalui hasil rekomendasi opini dari kepatuhan dan Manajemen Risiko maupun hasil evaluasi bersama dengan Pimpinan Cabang.

3. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris

1.	Nama	Julia Intan Sitorus
----	------	---------------------

Penjelasan Tugas dan Tanggung Jawab:

Tugas dan tanggung jawab KOMISARIS UTAMA adalah sebagai berikut

1. Mengevaluasi dan memberi persetujuan atas strategi bisnis secara keseluruhan, anggaran tahunan, kebijakan manajemen risiko, serta tindakan Direksi lainnya yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perusahaan dan peraturan perundang-undangan;
2. Memastikan bahwa keputusan dan pengeluaran modal mempertimbangkan sasaran strategis jangka panjang Perusahaan;
3. Dalam melaksanakan pengawasan, Dewan Komisaris dilarang ikut serta dalam



- pengambilan keputusan mengenai kegiatan operasional BPR, kecuali terkait dengan:
- a. Penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana ketentuan yang mengatur mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR; dan
 - b. Hal- hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundang- undangan. Pengambilan keputusan oleh Dewan Komisaris merupakan bagian dari tugas pengawasan sehingga tetap menjadi tanggung jawab Direksi atas pelaksanaan tugas kepengurusan BPR.
4. Memastikan bahwa Perusahaan menjaga integritas finansial dan sesuai dengan rencana bisnis yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris dan keputusan yang diambil dalam RUPS; dan
 5. Memastikan pelaksanaan tata kelola Perusahaan yang baik sesuai dengan pedoman dan kode etik dalam segala aspek kegiatan Perusahaan, ikatan bisnis dan di semua tingkat hirarki Perusahaan.
 6. Tugas-Tugas Pokok Komisaris Utama :
 - a. Meninjau secara luas dan menyeluruh atas pelaksanaan tata kelola Perusahaan yang baik
 - b. Meninjau ulang masalah ekonomi makro dan keuangan
 - c. Berkomunikasi dengan pemegang saham pengendali sehubungan dengan hal hal yang melibatkan pemegang saham ; dan
 - d. Memimpin Rapat Dewan Komisaris dan rapat gabungan dengan Direksi
 - e. Memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada RUPS
 - f. Menyampaikan laporan pelaksanaan rencana bisnis terhadap rencana kerja kepada Otoritas Jasa Keuangan.
 - g. Menindaklanjuti hasil temuan audit Intern dan ekstern

2.

Nama

Jonhson Siagian

Penjelasan Tugas dan Tanggung Jawab:

Tugas dan tanggung jawab KOMISARIS adalah sebagai berikut:

1. Mengevaluasi dan memberi persetujuan atas strategi bisnis secara keseluruhan, anggaran tahunan, kebijakan manajemen risiko, serta tindakan Direksi lainnya yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perusahaan dan peraturan perundang-undangan;
2. Memastikan bahwa keputusan dan pengeluaran modal mempertimbangkan sasaran strategis jangka panjang Perusahaan;
3. Dalam melaksanakan pengawasan, Dewan Komisaris dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan operasional BPR, kecuali terkait dengan:
 - a. Penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana ketentuan yang mengatur mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR; dan
 - b. hal- hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundang- undangan. Pengambilan keputusan oleh Dewan Komisaris merupakan bagian dari tugas pengawasan sehingga tetap menjadi tanggung jawab Direksi atas pelaksanaan tugas kepengurusan BPR.
4. Memastikan bahwa Perusahaan menjaga integritas finansial dan sesuai dengan rencana bisnis yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris dan keputusan yang diambil dalam RUPS; dan
5. Memastikan pelaksanaan tata kelola Perusahaan yang baik sesuai dengan pedoman dan kode etik dalam segala aspek kegiatan Perusahaan, ikatan bisnis dan di semua tingkat hirarki Perusahaan.
6. Tugas-Tugas Pokok Komisaris
 - a. Melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengelolaan perusahaan;
 - b. Memberi nasihat kepada Direksi dengan itikad baik, penuh tanggungjawab dan kehati hatian; dan
 - c. Melakukan pengawasan terhadap keputusan keputusan yang sudah ada maupun yang belum diambil oleh Direksi perusahaan.
 - d. Memberikan nasihat dalam masalah hukum.



3.

Nama

Teti Herniawati

Penjelasan Tugas dan Tanggung Jawab:

Tugas dan tanggungjawab KOMISARIS INDEPENDEN adalah sebagai berikut:

1. Mengevaluasi dan memberi persetujuan atas strategi bisnis secara keseluruhan, anggaran tahunan, kebijakan manajemen risiko, serta tindakan Direksi lainnya yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perusahaan dan peraturan perundang-undangan;
2. Memastikan bahwa keputusan dan pengeluaran modal mempertimbangkan sasaran strategis jangka panjang Perusahaan;
3. Dalam melaksanakan pengawasan, Dewan Komisaris dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan operasional BPR, kecuali terkait dengan:
 - a. Penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana ketentuan yang mengatur mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR; dan
 - b. hal- hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundang- undangan. Pengambilan keputusan oleh Dewan Komisaris merupakan bagian dari tugas pengawasan sehingga tetap menjadi tanggung jawab Direksi atas pelaksanaan tugas kepengurusan BPR.
4. Memastikan bahwa Perusahaan menjaga integritas finansial dan sesuai dengan rencana bisnis yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris dan keputusan yang diambil dalam RUPS; dan
5. Memastikan pelaksanaan tata kelola Perusahaan yang baik sesuai dengan pedoman dan kode etik dalam segala aspek kegiatan Perusahaan, ikatan bisnis dan di semua tingkat hirarki Perusahaan.
6. Tugas-Tugas Pokok Komisaris
 - a. Melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengelolaan perusahaan;
 - b. Memberi nasihat kepada Direksi dengan itikad baik, penuh tanggungjawab dan kehati hatian;
 - c. Melakukan pengawasan terhadap keputusan keputusan yang sudah ada maupun yang belum diambil oleh Direksi perusahaan; dan
 - d. Memberikan nasihat dalam masalah hukum.

Rekomendasi Kepada Direksi:

Saran dan Rekomendasi Dewan Komisaris Kepada Direksi:

1. Pimpinan cabang Cimahi untuk dilakukan evaluasi kembali dan Dekom menyarankan untuk dilakukan demosi menjadi Kabag Kredit, dan Direksi diharapkan dapat mengklarifikasi terhadap hal tersebut kepada pimpinan cabang Cimahi, sehingga dalam memutuskan kebijakan berdasarkan hasil evaluasi yang benar. (Notulen Rapat 7 Maret 2024/ Memorandum 001/ S.Dekom/BPR-SMP/III/2024)
2. Menambah karyawan untuk satuan kerja bisnis untuk membantu pemantauan dan penyelesaian kredit bermasalah. (Notulen Rapat 12 Juli 2024)
3. Melakukan evaluasi secara berkala terhadap kinerja pimpinan cabang dan dilaporkan kepada dewan komisaris setiap triwulanan. (Notulen Rapat 12 Juli 2024)
4. Direksi agar melakukan langkah kajian terlebih dahulu terhadap pihak instansi atau lembaga yang akan diajak bekerjasama sebelum melakukan MOU. Kajian yang dimaksud sekurang- kurangnya dapat memberikan gambaran yang cukup meyakinkan perihal :
 - Kondisi instansi atau lembaga tersebut untuk menilai kontinuitas usahanya
 - Informasi jumlah karyawan, yang mencakup informasi karyawan tetap dan kontrak
 - Informasi mengenai ada tidaknya fasilitas pinjaman(kredit) yang diselenggarakan oleh bank pembayar gaji.

Memberikan laporan kepada Dewan Komisaris perihal permasalahan yang menjadi penyebab belum berkontribusinya terhadap bisnis BPR Sinar Mas Pelita, dari beberapa MOU sebagaimana dimaksud pada kajian di atas. (Memorandum Dekom No. 017/ S.Dekom/ BPR- SMP/ VIII/2024



tanggal 26 Agustus 2024)

4. Tugas, Tanggung Jawab, Program Kerja, dan Realisasi Program Kerja Komite Tindak Lanjut Rekomendasi Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite: Akan dibentuk paling lambat tahun 2025
5. Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite Tindak Lanjut Rekomendasi Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite: Akan dibentuk paling lambat tahun 2025
6. Kepemilikan Saham Anggota Direksi dan Dewan Komisaris pada BPR

Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR

1.	Nama	Taufiq Nugraha
	Persentase Kepemilikan (%)	0,00
2.	Nama	Yayu Septiawati
	Persentase Kepemilikan (%)	0,00
3.	Nama	Derry Panahatan Sitorus
	Persentase Kepemilikan (%)	6,48
4.	Nama	Siti Rijah
	Persentase Kepemilikan (%)	0,00

Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR

1.	Nama	Julia Intan Sitorus
	Persentase Kepemilikan (%)	6,11
2.	Nama	Jonhson Siagian
	Persentase Kepemilikan (%)	0,00
3.	Nama	Teti Herniawati
	Persentase Kepemilikan (%)	0,00

Direktur operasional memiliki kepemilikan saham sebesar 6.48% dan Komisaris Utama memiliki kepemilikan saham sebesar 6.11% di PT BPR SINAR MAS PELITA pada tahun 2024 dan tahun sebelumnya.



7. Kepemilikan Saham Anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham pada Kelompok Usaha BPR

Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Kelompok Usaha BPR

1.	Nama	Taufiq Nugraha
	Nama Kelompok Usaha BPR	Tidak Ada Kepemilikan Saham
	Persentase Kepemilikan (%)	0,00
	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya	0,00
2.	Nama	Yayu Septiawati
	Nama Kelompok Usaha BPR	Tidak Ada Kepemilikan Saham
	Persentase Kepemilikan (%)	0,00
	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya	0,00
3.	Nama	Derry Panahatan Sitorus
	Nama Kelompok Usaha BPR	Tidak Ada Kepemilikan Saham
	Persentase Kepemilikan (%)	0,00
	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya	0,00
4.	Nama	Siti Rijah
	Nama Kelompok Usaha BPR	Tidak Ada Kepemilikan Saham
	Persentase Kepemilikan (%)	0,00
	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya	0,00

Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Kelompok Usaha BPR

1.	Nama	Julia Intan Sitorus
	Nama Kelompok Usaha BPR	Tidak Ada Kepemilikan Saham
	Persentase Kepemilikan (%)	0,00
	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya	0,00
2.	Nama	Jonhson Siagian
	Nama Kelompok Usaha BPR	Tidak Ada Kepemilikan Saham
	Persentase Kepemilikan (%)	0,00
	Persentase Kepemilikan (%) Tahun	0,00



	Sebelumnya	
3.	Nama	Teti Herniawati
	Nama Kelompok Usaha BPR	Tidak Ada Kepemilikan Saham
	Persentase Kepemilikan (%)	0,00
	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya	0,00

Kepemilikan Saham Pemegang Saham BPR/BPRS

Nihil

8. Kepemilikan Saham Anggota Direksi dan Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain

1.	Nama	Derry Panahatan Sitorus
	Nama Bank/Perusahaan Lain	PT PUTRA MANDIRI POLIN
	Persentase Kepemilikan (%)	10,00
2.	Nama	Derry Panahatan Sitorus
	Nama Bank/Perusahaan Lain	PT PANGANDARAN PUTRA
	Persentase Kepemilikan (%)	10,00
3.	Nama	Derry Panahatan Sitorus
	Nama Bank/Perusahaan Lain	PT SOGAS INDAH PERDANA
	Persentase Kepemilikan (%)	12,00
4.	Nama	Derry Panahatan Sitorus
	Nama Bank/Perusahaan Lain	PT BETHESDA HOSPITAL INDONESIA
	Persentase Kepemilikan (%)	5,00
5.	Nama	Derry Panahatan Sitorus
	Nama Bank/Perusahaan Lain	PT LINGGAJATI EKAKARSA
	Persentase Kepemilikan (%)	9,90

Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

1.	Nama	Julia Intan Sitorus
	Nama Bank/Perusahaan Lain	PT LINGGAJATI EKAKARSA
	Persentase Kepemilikan (%)	9,90



2.	Nama	Julia Intan Sitorus
	Nama Bank/Perusahaan Lain	PT PUTRA MANDIRI POLIN
	Persentase Kepemilikan (%)	10,00
3.	Nama	Julia Intan Sitorus
	Nama Bank/Perusahaan Lain	PT BETHESDA HOSPITAL INDONESIA
	Persentase Kepemilikan (%)	5,00

Terdapat Kepemilikan saham pada perusahaan lain yang dimiliki oleh Direktur Operasional dan Komisaris Utama

9. Hubungan Keuangan Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham pada BPR

Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR		
1.	Nama	Taufiq Nugraha
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keuangan Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Tidak ada
2.	Nama	Yayu Septiawati
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keuangan Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Tidak ada
3.	Nama	Derry Panahatan Sitorus
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Ada
	Hubungan Keuangan Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Ada
4.	Nama	Siti Rijah
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada



Hubungan Keuangan Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada
Hubungan Keuangan Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Tidak ada

Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

1.	Nama	Julia Intan Sitorus
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Ada
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keuangan Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Ada
2.	Nama	Jonhson Siagian
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keuangan Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Tidak ada
3.	Nama	Teti Herniawati
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keuangan Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Tidak ada

Hubungan Keuangan Pemegang Saham pada BPR

Terdapat hubungan keuangan anggota direksi dan dewan komisaris yaitu Direktur Operasional dan Komisaris Utama pada BPR

10. Hubungan Keluarga Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham pada BPR

Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR

1.	Nama	Taufiq Nugraha
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada



	Hubungan Keluarga Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Tidak ada
2.	Nama	Yayu Septiawati
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keluarga Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Tidak ada
3.	Nama	Derry Panahatan Sitorus
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Adik kandung dengan Komisaris Utama - Julia Intan Sitorus
	Hubungan Keluarga Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Ibu Dince Sinaga - Ibu, Ibu Parulian Debby - Kakak, Ibu Julia Sitorus - adik, Ibu Julita Sitorus - Adik, Bpk Harbangan Sitorus - Paman, Bpk Mangantar Sitorus – Paman, Ibu Mutiara Siagian - Nenek, Bpk Pintor Sitorus - Paman, Ibu Mintaria Sitorus - Tante, Bpk.Hamrin Malo - Paman, Bpk Poltak Sitorus - Paman, Ibu Tiamin Sitorus - Tante, Ibu Minar Sitorus – Tante
4.	Nama	Siti Rijah
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keluarga Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Tidak ada

Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR

1.	Nama	Julia Intan Sitorus
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Kakak Kandung dengan Bapak Derry Panahatan Sitorus
	Hubungan Keluarga Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Ibu Dince Sinaga – Ibu, Ibu Parulian Debby – kakak, Bapak Derry P Sitorus – kakak, Ibu Julita Sitorus – Adik, Bpk Harbangan Sitorus – Paman,



		Bpk Mangantar Sitorus – Paman, Ibu Mutiara Siagian – Nenek, Bpk Pintor Sitorus – Paman, Ibu Mintaria Sitorus – Tante, Bpk.Hamrin Malo – Paman, Bpk Poltak Sitorus – Paman, Ibu Tiamin Sitorus – Tante, Ibu Minar Sitorus – Tante.
2.	Nama	Jonhson Siagian
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keluarga Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Tidak ada
3.	Nama	Teti Herniawati
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keluarga Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Tidak ada

Hubungan Keluarga Pemegang Saham pada BPR

Terdapat hubungan anggota keluarga pada salah satu Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yaitu Ibu Julia Intan Sitorus dan Bpk Derry Panahatan Sitorus, dengan salah satu anggota pengurus dan para pemegang saham.

11. Paket/Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris

1.1. Gaji Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Gaji	4 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Gaji Direksi (Rp)	Rp1.340.000.000
Jumlah Komisaris Penerima Gaji	3 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Gaji Komisaris (Rp)	Rp828.000.000

1.2. Tunjangan Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Tunjangan	0 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Tunjangan Direksi (Rp)	Rp0



Jumlah Komisaris Penerima Tunjangan	0 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Tunjangan Komisaris (Rp)	Rp0

1.3. Tantiem Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Tantiem	4 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Tantiem Direksi (Rp)	Rp131.911.572
Jumlah Komisaris Penerima Tantiem	3 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Tantiem Komisaris (Rp)	Rp110.157.826

1.4. Kompensasi berbasis saham Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Kompensasi berbasis saham	0 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Kompensasi berbasis saham Direksi (Rp)	Rp0
Jumlah Komisaris Penerima Kompensasi berbasis saham	0 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Kompensasi berbasis saham Komisaris (Rp)	Rp0

1.5. Remunerasi lainnya Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Remunerasi lainnya	4 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Remunerasi lainnya Direksi (Rp)	Rp114.000.000
Jumlah Komisaris Penerima Remunerasi lainnya	3 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Remunerasi lainnya Komisaris (Rp)	Rp73.000.000



2.1. Perumahan Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Perumahan (Orang)	0 orang
Jumlah Nominal Perumahan Direksi (Rp)	Rp0
Jumlah Komisaris Penerima Perumahan (Orang)	0 orang
Jumlah Nominal Perumahan Komisaris (Rp)	Rp0

2.2. Transportasi Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Transportasi (Orang)	4 orang
Jumlah Nominal Transportasi Direksi (Rp)	Rp336.000.000
Jumlah Komisaris Penerima Transportasi (Orang)	3 orang
Jumlah Nominal Transportasi Komisaris (Rp)	Rp252.000.000

2.3. Asuransi Kesehatan Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Asuransi Kesehatan (Orang)	0 orang
Jumlah Nominal Asuransi Kesehatan Direksi (Rp)	Rp0
Jumlah Komisaris Penerima Asuransi Kesehatan (Orang)	0 orang
Jumlah Nominal Asuransi Kesehatan Komisaris (Rp)	Rp0

2.4. Fasilitas Lain-Lainnya Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Fasilitas Lain-Lainnya (Orang)	4 orang
Jumlah Nominal Fasilitas Lain-Lainnya Direksi (Rp)	Rp0
Jumlah Komisaris Penerima Fasilitas	3 orang



Lain-Lainnya (Orang)	
Jumlah Nominal Fasilitas Lain-Lainnya Komisaris (Rp)	Rp0

Fasilitas lain yang didapatkan oleh dewan komisaris dan anggota direksi yaitu fasilitas kendaraan dinas, dan untuk direktur utama dan direktur bisnis mendapat fasilitas rumah dinas. Pemberian Fasilitas sudah sesuai dengan akta terakhir yang diputuskan di RUPS.

12. Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah

1. Rasio (a) gaji pegawai yang tertinggi dan (b) gaji pegawai yang terendah

Rasio (a/b) 8,30 : 1

2. Rasio (a) gaji anggota Direksi yang tertinggi dan (b) gaji anggota Direksi yang terendah

Rasio (a/b) 1,07 : 1

3. Rasio (a) gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi dan (b) gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah

Rasio (a/b) 1,04 : 1

4. Rasio (a) gaji anggota Direksi yang tertinggi dan (b) gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi

Rasio (a/b) 1,02 : 1

5. Rasio (a) gaji anggota Direksi yang tertinggi dan (b) gaji pegawai yang tertinggi

Rasio (a/b) 2,13 : 1

Untuk posisi pelaporan tahun 2024 tidak terdapat perubahan pada rasio gaji.

13. Pelaksanaan Rapat dalam 1 (satu) tahun

1.	Tanggal Rapat	09 Januari 2024
	Jumlah Peserta	3 orang
	Topik/Materi Pembahasan: Rapat Pertama Tentang Evaluasi Pengawasan terhadap hasil pemeriksaan SKAI, Rencana kerja serta Laporan hasil pemeriksaan KAP Tahun buku 2023	
2.	Tanggal Rapat	12 Juli 2024
	Jumlah Peserta	3 orang
	Topik/Materi Pembahasan:	



	Rapat Kedua Tentang Evaluasi realisasi kinerja, Penerapan Tata Kelola dan Evaluasi Manajemen Risiko Kredit dan Penerapan APU PPT	
3.	Tanggal Rapat	07 Oktober 2024
	Jumlah Peserta	3 orang
	Topik/Materi Pembahasan: Rapat Ketiga Tentang Evaluasi Realisasi Kinerja Triwulan 3, Pengembangan infrastruktur rencana penggantian CBS, Pengawasan Perlindungan Konsumen dan evaluasi Kebijakan Anti Fraud serta Penerapan APU PPT dan PPPSPM	
4.	Tanggal Rapat	09 Januari 2024
	Jumlah Peserta	6 orang
	Topik/Materi Pembahasan: Rapat pengurus pertama tentang Penjelasan hasil kinerja tahun 2023 dari Direksi	
5.	Tanggal Rapat	05 Februari 2024
	Jumlah Peserta	10 orang
	Topik/Materi Pembahasan: Rapat pengurus kedua membahas tentang Rencana Kerja SKAI 2024, Perhitungan PPh 21 sesuai PMK No. 168 dan PP No 58 Tahun 2023 serta pembahasan SDM dan Peraturan Perusahaan.	
6.	Tanggal Rapat	15 Maret 2024
	Jumlah Peserta	7 orang
	Topik/Materi Pembahasan: Rapat pengurus ketiga membahas tentang review hasil temuan SKAI, Rencana Penghapusan ATI dan Evaluasi Kantor Cabang yang akan pindah kantor	
7.	Tanggal Rapat	21 Mei 2024
	Jumlah Peserta	7 orang
	Topik/Materi Pembahasan: Rapat pengurus ke empat membahas tentang tindak lanjut hasil RUPS Tahun Buku 2023 serta hal-hal strategis lainnya.	
8.	Tanggal Rapat	11 Juni 2024
	Jumlah Peserta	7 orang
	Topik/Materi Pembahasan: Rapat pengurus ke lima membahas terkait pengunduran diri Pimpinan Cabang, Perpanjangan PKS dengan Asuransi dan isu-isu strategis lainnya.	
9.	Tanggal Rapat	22 Juli 2024
	Jumlah Peserta	6 orang
	Topik/Materi Pembahasan: Rapat pengurus ke enam membahas Evaluasi Kebijakan dan hal-hal strategis lainnya.	



10.	Tanggal Rapat	23 Juli 2024
	Jumlah Peserta	10 orang
Topik/Materi Pembahasan: Rapat pengurus ke tujuh membahas terkait pengenalan layanan CBS baru yaitu sistem DOTS dan DOTS Mobile dari PT Dimensi Kreasi Nusantara.		
11.	Tanggal Rapat	26 Juli 2024
	Jumlah Peserta	5 orang
Topik/Materi Pembahasan: Rapat pengurus ke delapan membahas terkait evaluasi kebijakan.		

Rapat memenuhi syarat rapat dekom dalam 1 tahun dan dihadiri oleh seluruh Dewan Komisaris dan seluruh Direksi.

14. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

Kehadiran Anggota Dewan Komisaris dalam Pelaksanaan Rapat dalam 1 (satu) Tahun

1.	Nama Anggota Dewan Komisaris	Julia Intan Sitorus
	Frekuensi Kehadiran (Fisik)	8 kali hadir
	Frekuensi Kehadiran (Telekonferensi)	1 kali hadir
2.	Nama Anggota Dewan Komisaris	Jonhson Siagian
	Frekuensi Kehadiran (Fisik)	9 kali hadir
	Frekuensi Kehadiran (Telekonferensi)	0 kali hadir
3.	Nama Anggota Dewan Komisaris	Teti Herniawati
	Frekuensi Kehadiran (Fisik)	11 kali hadir
	Frekuensi Kehadiran (Telekonferensi)	0 kali hadir

Komisaris Independen menghadiri seluruh pertemuan fisik dari seluruh rapat dewan komisaris dan pengurus yang dilaksanakan, kecuali Komisaris Utama dan Komisaris terdapat 2 pertemuan rapat pengurus yang tidak dihadiri.

15. Jumlah Penyimpangan Intern (Internal Fraud)

1.1. Jumlah Penyimpangan Internal oleh Anggota Direksi

Total Fraud Pada Tahun Laporan	0 kasus
Total Fraud Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Telah Diselesaikan Pada Tahun Laporan	0 kasus
Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Laporan	0 kasus



Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Laporan	0 kasus
Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum Pada Tahun Laporan	0 kasus

1.2. Jumlah Penyimpangan Internal oleh Anggota Dewan Komisaris

Total Fraud Pada Tahun Laporan	0 kasus
Total Fraud Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Telah Diselesaikan Pada Tahun Laporan	0 kasus
Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Laporan	0 kasus
Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Laporan	0 kasus
Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum Pada Tahun Laporan	0 kasus

1.3. Jumlah Penyimpangan Internal oleh Pegawai Tetap

Total Fraud Pada Tahun Laporan	7 kasus
Total Fraud Pada Tahun Sebelumnya	4 kasus
Telah Diselesaikan Pada Tahun Laporan	3 kasus
Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Laporan	0 kasus
Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Laporan	0 kasus



Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum Pada Tahun Laporan	0 kasus

1.4. Jumlah Penyimpangan Internal oleh Pegawai Tidak Tetap

Total Fraud Pada Tahun Laporan	0 kasus
Total Fraud Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Telah Diselesaikan Pada Tahun Laporan	0 kasus
Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Laporan	0 kasus
Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Laporan	0 kasus
Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum Pada Tahun Laporan	0 kasus

Proses Penyelesaian Fraud yang dilakukan oleh karyawan pada tahun 2023 sebanyak 3 kasus dan masih dalam proses penyelesaian sampai dengan tahun laporan, kemudian untuk kasus 2024 adalah sebanyak 7 kasus dan dalam proses penyelesaian 5 kasus. Maka kasus fraud yang masih dalam proses di tahun laporan ada sebanyak 8 kasus.

16. Permasalahan Hukum yang Dihadapi

1.1. Permasalahan Hukum yang Telah Selesai

Permasalahan Hukum Perdata yang Telah Selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	0 kasus
Permasalahan Hukum Pidana yang Telah Selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	0 kasus



1.2. Permasalahan Hukum yang Dalam Proses Penyelesaian

Permasalahan Hukum Perdata yang Dalam Proses Penyelesaian	0 kasus
Permasalahan Hukum Pidana yang Dalam Proses Penyelesaian	0 kasus

Nihil.

17. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

1.	Nama Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan	Derry Panahatan Sitorus
	Jabatan Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan	Direktur Operasional
	Nama Pengambil Keputusan	Taufiq Nugraha, Siti Rijah, Yayu Septiawati
	Jabatan Pengambil Keputusan	Direktur Utama, Dir Kepatuhan, Dir Bisnis
	Jenis Transaksi	Sewa Kendaraan (6 Unit)
	Nilai Transaksi	Rp52.500.000
	Keterangan: Harga sewa sesuai harga pasaran sewa kendaraan di Kota Bandung dan Sekitarnya dengan melihat pada harga sewa di tempat penyewaan sejenis.	
2.	Nama Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan	Derry Panahatan Sitorus
	Jabatan Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan	Direktur Operasional
	Nama Pengambil Keputusan	Taufiq Nugraha, Siti Rijah, Yayu Septiawati
	Jabatan Pengambil Keputusan	Taufiq Nugraha, Siti Rijah, Yayu Septiawati
	Jenis Transaksi	Sewa rumah dinas untuk Direktur Bisnis selama 3 tahun
	Nilai Transaksi	Rp66.000.000
	Keterangan: Harga sewa sesuai harga pasaran rumah di Kota Bandung dan Sekitarnya dengan sesuai penilaian dari KJPP.	

Terdapat transaksi yang memiliki benturan kepentingan yaitu sewa kendaraan dan sewa rumah dinas tetapi harga sewa tidak melebihi harga pasar bahkan di bawah harga pasar.



18. Pemberian Dana untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik

Pemberian Dana untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik

1.	Tanggal Pelaksanaan	10 Juli 2024
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	Yayasan peduli masjid nusantara
	Penjelasan Kegiatan	Penyembelihan Hewan Qurban
	Jumlah (Rp)	Rp3.300.000
2.	Tanggal Pelaksanaan	27 Agustus 2025
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	Wilayah KC Cikarang Barat
	Penjelasan Kegiatan	Pemberian santunan anak yatim
	Jumlah (Rp)	Rp6.980.000
3.	Tanggal Pelaksanaan	29 Agustus 2025
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	Masjid Al-Jabbar Bandung
	Penjelasan Kegiatan	Penanaman bibit pohon (Realisasi RAKB)
	Jumlah (Rp)	Rp5.000.000

Selama tahun 2024 PT BPR Sinar Mas Pelita telah mengikuti kegiatan sosial dengan pemberian dana bantuan Penanaman Bibit Pohon dan pemberian santunan berupa sumbangan qurban Idul Adha ke pengurus RT setempat dan santunan anak yatim.

Demikian Laporan ini dibuat yang menjadi transparansi PT. BPR Sinar Mas Pelita untuk tahun 2024. Demikian kami sampaikan atas perhatian serta kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Bandung Barat, 30 April 2025

PT. BPR Sinar Mas Pelita

Taufiq Nugraha
Direktur Utama

Julia Intan Sitorus
Komisaris Utama